



SUKA PRESS

RITUAL DAN SPIRITUALITAS POLITISI

" Bentuk Menarik Tradisi Menjelang Pemilihan itu Ritualnya "

MAHATVA YOGA

Ritual dan Spiritualitas Politisi

“ Bentuk Menarik Tradisi Menjelang Pemilihan Itu Ritualnya ”

Ritual Dan Spiritualitas Politisi

« Bentuk Menarik Tradisi Menjelang Pemilihan Itu Ritualnya »

***Mahatva Yoga Adi Pradana**

Penyunting: Mega Karunia Gumelar

Desain Sampul dan isi: Mahatva Yoga Adi Pradana

Foto Cover Dok : M. Fiqri Fadillah

Diterbitkan oleh:



SUKA Press

Jl. Marsda Adisucipto. Lt 3 Gedung Rektorat Lama (PKSI)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. 085743477290 Fax. (0274)589266/512474

Cetakan 1, Mei 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh

isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

* Mahatva Yoga Adi Pradana.

Ritual dan Spiritualitas Politisi “Bentuk Menarik Tradisi Menjelang Pemilihan Itu Ritualnya “

---- Yogyakarta: Suka Press 2021

vi + 169 hlm ; 15 x 23

ISBN 978-623-7816-35-5

1. Politik 2. Ritual 3. Judul

Dedication

Buku ini merupakan pengembangan dari apa yang sudah penulis lakukan dalam rangka memotret tradisi pemilihan dalam ranah ritual politik. Bentuk tradisi ini menjadi salah satu rutinitas penting yang biasa dilakukan oleh para politisi. Ritual dan spiritualitas politisi menjadi cara yang tidak jarang menjadi strategi utama apabila politisi tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan suara banyak. Oleh karena itu besar kemungkinan cara-cara ini dilakukan atas dasar meraup citra publik yang sebenarnya susah dibuktikan namun ada di sekitar kita.

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iv
Pengantar	vi
Bab I.....	2
Melihat Problem Kekinian	2
Bab II.....	23
Sistem Kepercayaan, Nilai Dan Sikap	23
Bab III	39
“ <i>Nyuwun</i> “	39
Bab IV	49
Budaya Elit Politik Dalam Mencari Dukungan.....	49
Bab V.....	63
Elit Datang Menuju Situs.....	63
Bab VI	70
Ritualisasi Politik Sebelum Berkontestasi	70

Mahatva Yoga.....	iv
Bab VII	79
Jejak Ritual Politisi	79
Bab VIII	111
Rasionalitas Elit, Tradisi dan Politisi Pragmatis.....	111
Bab Penutup.....	150
Sekelumit cerita singkat	150

Daftar Pustaka

Biografi Penulis

PENGANTAR

BUDAYA POLITISI LINTAS ERA

Sekapur Sirih Untuk Buku Ritual dan Spiritualitas Politisi

Perhelatan politik yang terjadi pada masa lampau hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari adanya budaya serta tradisi yang unik. Perilaku yang biasa dilakukan oleh para politisi yang berkontestasi nyatanya juga menciptakan budaya politik baru. Budaya yang dimaksud adalah adanya tindakan ritual yang dilakukan dalam rangka melancarkan hajat politik yang politisi. Berkunjung kepada kyai, sowan tokoh lintas agama, mengunjungi basis massa potensial, dan bahkan rela melakukan tindakan yang bagi masyarakat awam dianggap “nyeleneh”.

Buku yang ditulis oleh Alumni FISIP, Mahatva Yoga ini adalah bukti masih banyaknya perilaku-perilaku yang di dasarkan pada spiritualitas politisi. Tindakan yang dilakukan dalam rangka melancarkan hajat politiknya ini identik dengan budaya mistisme. Budaya yang erat kaitannya dengan Makam Keramat, Situs Peninggalan Sejarah, Benda-benda Pusaka serta mendatangi para Tokoh Spiritual nyatanya menjadi alternatif strategi politik untuk menghadapi kompetisi yang ketat.

Apa yang dijelaskan dalam buku ini menunjukkan mistis dan politik berjalan bersama untuk menciptakan budaya politik lama rasa millennial. Memang benar apabila situs

yang dijadikan sebagai objek penulis memiliki tuah, karena memang Kabupaten Malang memiliki beragam cerita mistis terlebih dengan adanya Kerajaan Singhasari. Kerajaan ini adalah wujud dilahirkannya Kerajaan-Kerajaan Besar di Tanah Jawa.

Oleh karena itu politik adalah rasionalitas yang utama, namun kadang ketidak rasionalan itulah yang justru membuat adanya budaya-budaya politik ini tetap bertahan sampai saat ini. Semoga apa yang penulis lakukan dapat menambah kajian sosiologi politik khususnya penguatan tradisi politik lokal. Terlebih saat ini penulis merupakan Akademisi yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Malang, Mei 2021

Dr. Sholih Mu'adi, SH, M.Si
Dekan FISIP Periode 2020-2024
Universitas Brawijaya Malang



***“ DALAM POLITIK KADANG
SERINGKALI DIWARNAI INTRIK, INTRIK
INIPUN JUGA TERJADI PADA
DUKUNGAN TAK KASAT MATA “***

BAB I

MELIHAT PROBLEM KEKINIAN



Masyarakat selalu dibuat bingung mengapa dalam setiap perhelatan politik, pasti banyak yang datang berkunjung untuk minta dukungan pada Tokoh Agama yang bukan berasal dari basis pemilihnya....

“Cuplikan wawancara Masyarakat Sekitar Pondok”

Di dalam masyarakat pada umumnya memiliki kelas-kelas sosial tertentu dimana diantara masyarakat tersebut dibagi dalam golongan atas, menengah dan kelas bawah. Serta disamping itu ada juga yang menggolongkan kelas sosial masyarakat atas kelas yang diperintah dan kelas yang memerintah. Kelas yang memerintah inilah yang disebut oleh sebagian para ahli ilmu sosial dengan istilah elit. Dimana elit merupakan

kelas sosial yang dianggap sebagai kelas sosial yang cukup tinggi di dalam masyarakat dan hanya bisa dimasuki oleh segolongan orang yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan orang lainya karena cenderung eksklusif dan tertutup untuk bisa dijangkau oleh kelas masyarakat biasa yang ingin menjadi elit (Sitepu, 2012:82).

Semua itu diyakini diperoleh melalui penguasaan jabatan-jabatan strategis dan pos-pos basah di birokrasi pemerintahan, parlemen, kehakiman, kepolisian, perpajakan, beacukai, dan sebagainya. Dalam upaya menguasai jabatan-jabatan yang menjanjikan kemakmuran material itu, *elit politik* pun meminta dukungan dan memanfaatkan jasa-jasa dukun politik, "orang pintar" paranormal, penasehat spiritual, dan sebagainya.

Elit politik rela membayar mahal dan menjalankan ritual-ritual tertentu demi memperoleh dan mempertahankan jabatan. Ketamakan pada jabatan

membuat banyak politisi menghalalkan segala cara, untuk bisa merebut atau mempertahankan jabatan. Karena umumnya mesin partai tidak berjalan dan para calon tidak betul-betul memahami aspirasi konstituennya sendiri, mereka pun “terjebak” untuk menggunakan cara-cara lain. Mulai dari main uang (*money politics*), mengeksploitasi atau memperlakukakan simbol-simbol keagamaan dan primordial, serta terakhir memanfaatkan jasa “*dukun-dukun politik*.”

Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya (Susilowati, 2009).

Di Malang pengaruh adanya dukun politik ini sangat kuat seperti halnya yang ada di Pesarean Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan tempat ritual yang telah lama menjadi tujuan para peziarah terutama bagi masyarakat

etnis Cina dan etnis lainya dan dari beragam agama. Pengelola tempat-tempat ritual adalah pihak yang paling berperan dalam kegiatan ritual peziarahan Gunung Kawi. Mereka bukan hanya menjalankan peran sebagai pengelola kegiatan ritual namun juga dalam kegiatan ekonomi ritual. Inti dari semua kegiatan ritual di Gunung Kawi pada muaranya tertuju pada makam keramat Eyang Jugo dan Eyang Iman Sujono di Pesarean. Jumlah peziarah dan intensitasnya memberikan dampak pada pendapatan pada semua pihak yang berkepentingan disana, sehingga mereka memiliki kepentingan untuk menjaga agar jumlah pengunjung/peziarah tidak turun. Persoalan jumlah peziarah yang datang ke Gunung Kawi adalah masalah penghidupan bagi banyak orang di Wonosari yang bekerja dan mendapatkan penghasilan secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan peziarahan (Ririn, 2015)

Keadaan yang terjadi di pesarean Gunung Kawi ini umum terjadi di dalam masyarakat yang masih agraris.

Guna mencapai tujuan-tujuan politik, untuk memperoleh pengaruh, mendapatkan wibawa dan menegakkan karismanya, sementara orang, terutama politisi, mencoba meminjam pengaruh tokoh-tokoh mitik dan kekuatan psikologis mistis tersebut.

Tokoh-tokoh mitik dan mistis dikenal sebagai pembisik serta pelindung. Mengedepankan peran pelindung dan pembisik "*gaib*" ini secara komunikasi politik memang gampang "*klik*" dengan tingkat kesadaran, pengetahuan serta analisa politik masyarakat yang pas-pasan. Akan kian kompatibel di tengah tingkat keterpurukan yang kian menjadi. Orang-orang yang mencari topangan dari tokoh-tokoh mitik dan kekuatan mistis ingin dilihat tampil tak ubah sebagai juru selamat (*mesias*). Dengan begini, orang-orang tersebut membawa politik ke dunia mistik. Memastikan politik sebagai suatu dunia gaib di mana logika tidak berfungsi. Karena itu, pembahasan program, evaluasi program tidak terlalu mendesak dilakukan. Kalau pun evaluasi, debat terbuka

program, dilangsungkan juga secara terkendali, maka nilainya lebih terletak pada makna komunikatif dan periklanan dalam suatu kampanye (Endaryanta, 2009).

Pemistisan politik dan mentrapkan politik mistis, dalam sejarah negeri ini bukanlah hal baru. Para pemimpin di Jawa, terutama di Jawa Tengah, dengan *Gerakan Ratu Adil* mereka, biasa mencari topangan wibawa dan karisma dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh lain yang berpengaruh serta dihormati. Mereka menyebut diri sebagai titisan, turunan ini dan itu, anak menantu tokoh-tokoh ini dan itu. Data dan logika tidak menjadi hitungan dalam politik mistis dan pemistisan politik (Endaryanta, 2009).

Contoh lain yang menonjol tentang praktik magis dalam dunia politik terlihat pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Kepemimpinan Soeharto memiliki aspek mistis, dan ini dapat dijelaskan sebagai bagian dari budaya kepemimpinan Jawa. Namun sebagai fakta sosial, kepemimpinannya juga menyandarkan diri kepada

penasihat spiritual dan mistis. Ada sejumlah dukun setia yang dipercaya memagari kepemimpinan Soeharto. Terdapat paling tidak seribu dukun di belakang Soeharto dari seluruh penjuru negeri.

Liputan media sesudah jatuhnya Soeharto tahun 1998 menyebutkan nama-nama Romo Marto Pangarso, Romo Diat, Soedjono Hoemardani, Ki Ageng Selo, Soedjarwo, Darundrio, mbah Diran, serta Eyang Tomo sebagai sebagian dari para penasihat spiritual yang setia. Selain dukungan dari penasehat spiritual, kepemimpinan Soeharto juga mendapat legitimasi dari kepemilikan benda-benda gaib ageman, pulung, dan kekuatan mistis. Soeharto setidaknya diyakini memiliki 113 pusaka dari berbagai penjuru tanah air, yang dipercaya berkontribusi dalam memperkokoh kepemimpinan politiknya.

Soeharto bahkan memiliki pusaka andalan berupa Mirah Delima yang dipercayai banyak membantunya dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Hal

itu dinyatakan oleh Ki Edan Amongrogo, salah satu tokoh spiritual. Maka, keberadaan dukun, pusaka, dan kepemimpinan Soeharto yang seolah-olah tidak bisa dipisahkan itu, menggarisbawahi bahwa praktik magi memang masih berlangsung dikalangan elite politik Indonesia, sampai saat sekarang (Arismunandar, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa budaya ritual politik telah terjadi sejak lama pada saat era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah mejadi hal yang pokok dalam kehidupannya.

Melville J.Herkovits menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat *superorganic*, karena

kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran. Dengan demikian bahwa kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yg sudah dimilikinya (Soekamto, 2006: 150).

Budaya masyarakat jawa yang menekuni budayanya secara mendalam. Hal ini terlihat dari pola hidup masyarakat jawa yang masih banyak melakukan serangkaian upacara *selametan*, memberi sajian pada waktu dan tempat tertentu serta berziarah ke makam-makam yang dianggap keramat (Mulder, 2003:3). Kebudayaan Jawa yang disebut kejawen merupakan kelengkapan diri dari setiap individu Jawa, karena di

dalamnya berisikan kosmologi, mitologi dan perangkat konsepsi mistik dalam pemahaman animisme dan dinamisme yang secara keseluruhan menimbulkan antropologi Jawa sendiri, yaitu sistem gagasan mengenai sifat dasar manusia dan masyarakatnya (Mulder, 2003: 16).

Mereka merasa mempunyai kewajiban untuk memelihara warisan budaya Jawa secara baik dan dapat mengungkapkannya dengan menaruh perhatian dan mampu melaksanakan setiap ketentuan tatanannya. Hal itu dikarenakan ajaran *kejawen* yang penuh dengan simbolisme telah merasuk dalam angan-angan dan perenungan masyarakat. Berkaitan dengan sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme, kepercayaan mengesakan Tuhan itu sering menjadi tidak murni oleh karena tercampur dengan pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap keramat, baik benda mati maupun benda hidup. Arti keramat disini bukan hanya sekedar berarti mulia, terhormat, tetapi memiliki daya magis,

sebagai sesuatu yang sakral bersifat illahiyah (Mulder, 2003:18).

Dalam tradisi Jawa terdapat berbagai jenis barang yang dikeramatkan. Ada yang disebut *azimat*, pusaka, dalam bentuk tombak, keris, ikat kepala, cincin, dan batu akik. Barang-barang peninggalan para raja Jawa yang disebut benda pusaka dan diberi sebutan "*kyai*", pada umumnya dipandang sebagai benda-benda keramat. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tertentu dipandang sebagai suci, keramat dan bertuah. Begitu juga kuburan-kuburan ataupun petilasan-petilasan, hari-hari tertentu, dipandang memiliki barokah atau juga bisa membawa kesialan. Barang-barang, benda-benda ataupun orang-orang keramat itu di pandang sebagai penghubung (*wasilah*) dengan Allah (Kresna, 2015).

Ketatnya persaingan dalam dunia politik menyebabkan setiap adanya perhelatan politik pastilah ramai, hiruk pikuk orang mencari dukungan alias kampanye, bersinggungan satu sama lain kerapkali

menimbulkan bentrok, kontak fisik, diwarnai kasak-kusuk di masyarakat. Di sinilah strategi para kontestan diadu. Banyak yang mengandalkan dengan ketokohan saudara, bapak, ibu, garis keturunan ningrat, ada pula melakukan kegiatan untuk menarik simpati. Pokoknya akal bulus pastilah keluar saat diperlukan. Itu hanyalah sebagian kecil dari hiruk pikuk politik yang tampak di permukaan.

Di balik itu, ada hal-hal yang sudah menjadi rahasia umum, dimana kegiatan politik praktis di Bali bahkan di Indonesia secara umumnya menggunakan kekuatan-kekuatan di luar kemampuan alamiah manusia. Percaya atau tidak, terasa atau tidak, nyata atau tidak, pokoknya praktek mistik dalam politik sangat kental terjadi. Bukan kali ini saja, namun sudah terjadi sejak jaman dahulu. Sesuatu yang tidak normal dilakukan oleh seorang politisi untuk mempengaruhi lawan politiknya, mempengaruhi masa pemilih dengan cara-cara tak normal tak masuk akal, dan tak logis, namun hasilnya

dapat dilihat. Ini adalah kerjaan dari paranormal / dukun-dukun politik sesuai dengan order kliennya. Keberadaan dukun politik menjadi makin laris manis ketika perhelatan politik dimulai. Semua mencari dukun, mencari jimat, semua pergi ke tempat angker, sunyi dan sepi di malam hari (Kresna, 2015).

Dukun merupakan aktor penting dan memiliki posisi sosial dalam budaya masyarakat. Peran dukun di tengah arus moderenisasi masih tetap bertahan karena kepercayaan masyarakat pada kekuatan gaib (supranatural) yang masih mempengaruhi kehidupan. Peran dukun meliputi segala bidang kehidupan termasuk di bidang politik. Dukun di ranah politik memainkan peran penting tidak sekedar aspek spritualitas namun acapkali menjadi *public speaker* ketika melakukan praktik.

Pemilukada sebagai ranah kontestasi membentuk nalar sendiri masing-masing aktor untuk melakukan tindakan. Nalar mistik dan nalar rasional dipertemukan

dalam Pemilukada. Dukun membangun nalar mistik sebagai basis kemampuannya dan menggunakan seperangkat mistis yang dimilikinya untuk menanamkan pengaruh. Sedangkan calon kepala daerah membangun nalar rasionalitas dengan menjadikan dukun sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

Relasi antara calon kepala daerah dan dukun bersifat resiprokal yang saling mempengaruhi. Calon kepala daerah menggunakan dukun untuk memperoleh dukungan dari masa pasien yang dimiliki oleh dukun untuk tujuan politiknya. Sedangkan dukun menggunakan calon kepala daerah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan legitimasi sebagai dukun ampuh. Dalam membangun relasi dengan dukun, calon kepala daerah menggunakan berbagai strategi politik, salah satunya dilakukan dengan mengintervensi dukun ketika berpraktik. Dukun diperankan sebagai vote getter, memproduksi isu, dan sebagai jaringan politik dalam Pemilukada (Sahlan, 2010).

Dalam memahami Kejawen memerlukan pemahaman yang mendalam karena didalamnya banyak terdapat simbol-simbol spiritual yang penuh makna sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif dan tidak terjadi salah arti. Ungkapan yang bersifat mistik kejawen tersebut dapat diwujudkan dalam teks-teks, mantra-mantra maupun doa-doa serta seni tari yang telah ada dalam masyarakat Jawa. Sebagai salah satu dari nilai eksoteris dari spiritualitas, pemakaian simbolisasi-simbolisasi yang disajikan dalam berbagai rupa dan bentuk pada budaya Jawa itu ditujukan kepada fungsi utama dari agama itu sendiri, yaitu pemahaman yang berujung pada perilaku. Salah satu simbol yang kerap kali muncul, digunakan, dan disakralkan oleh masyarakat Jawa adalah adanya sebuah situs peninggalan yang dianggap keramat (Roqib, 2007 : 53).

Diantara kepercayaan dalam kehidupan agama orang Jawa adalah tokoh-tokoh agama yang dikeramatkan Hal ini tidak lepas dari budaya kepercayaan asli masyarakat

Jawa kuno yang menganut agama animisme dan dinamisme, yang mengkeramatkan suatu tokoh yang dianggap mampu menghubungkan diri mereka dengan Tuhan (Gusti Allah atau *Pangeran*) baik tokoh tersebut masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia (Roqib, 2007:55). Sebagai bagian dari pemahaman terhadap orang keramat yang sudah meninggal, masyarakat Jawa meyakini bahwa ada roh halus yang berkeliaran disekitar tempat tinggalnya semula atau arwah leluhur. Roh nenek moyang dianggap masih bisa berhubungan dengan dunia material ini untuk memberi nasehat ataupun menghubungkan manusia di dunia material ini dengan Tuhan yang di alam ghaib (Roqib, 2007:55).

Makam nenek moyang adalah suatu tempat komunikasi dengan dunia arwah dengan dunia material, maka dari itu tempat tersebut sakral dan dihormati. Komunikasi dengan arwah nenek moyang dilakukan dengan upacara atau ritual tertentu semisal *nyekar*

dengan membakar kemenyan, bersemedi dan *slametan* atau *wilujengan*. Hal ini bagi masyarakat Jawa merupakan unsur terpenting dari hampir semua ritus dan upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya dan penganut agama jawi pada khususnya (Roqib, 2007:55-57).

Selamatan merupakan salah satu upacara keagamaan yang melambangkan kesatuan mistis dan sosial bagi mereka yang ikut didalam ritual tersebut (Gertz, 1998:13). Dalam masyarakat jawa selamatan diperingati ketika memohon hajat pada saat-saat tertentu yang dianggap diluar kemampuan manusia seperti kelahiran, sihir maupun mendirikan rumah supaya apa yang diinginkan dapat terwujud.

Budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap tokoh keramat, roh dan *slametan* tersebut masih tetap ada dan berkembang pada zaman modern ini di kalangan masyarakat Jawa meski sudah tidak menganut agama jawi. Hanya bentuk eksistensi dan ritualnya

sedikit berubah namun esensinya masihlah tetap sama dengan yang masyarakat Jawa kuno (Geertz, 1998:14).

Tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Jawa pada era modern yang lebih mengarah kepada kehidupan modern, simbolisasi-simbolisasi seperti candi, sumber mata air yang memuat ajaran dari leluhur masyarakat Jawa ini kerap kali sekedar dimaknai sebagai monumen peninggalan sejarah. Perubahan sudut pandang dalam memandang kebudayaan sendiri sebagai sesuatu yang unik, seperti perspektif masyarakat Barat dalam memandang kebudayaan kita atau memandang kebudayaan sendiri dengan kesan kuno dan *klenik*, seperti perspektif beberapa masyarakat modern menjadikan pengajaran-pengajaran leluhur masyarakat Jawa yang terselip dalam wujud simbol-simbol punden banyak terlupakan.

Dalam wujudnya yang beraneka-rupa di sekitar kita, simbolisasi *petilasan* bahkan lebih banyak terlewatkan mata. Sehingga tidak jarang kita tidak

mengetahui makna-makna tersembunyi di balik perwujudan simbolisnya, hingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menghayati dan mengejawantahkannya dalam perilaku. Dari realitas yang demikian ini, munculah gagasan yang sekaligus merupakan praktek budaya politik para elit politik. Misi kebudayaan ini tidak saja terbatas pada tataran simbolis yang ditandai pada para penghayat yang gemar memakai atribut pakaian Jawa saja, tapi lebih dari itu, para elit politik juga berperan aktif dalam misi-misi ritual, seremonial, kesenian, wejangan, serta menjadi teladan nyata bagi masyarakat lewat perilakunya sendiri sebagai bentuk praksis nyata dari pengejawantahan penghayatan perilaku atas makna-makna dan pemahaman dari berbagai macam ajaran-ajaran leluhur bangsa Jawa yang begitu sering disimbolisasikan dalam bentuk-bentuk kebendaan, mitos, sastra, dan tata perilaku. Misi kebudayaan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan atas kondisi sosial masyarakat Jawa era

modern yang masuk pada materialisme, hedonisme, dan fanatisme yang dianggap berpotensi melalaikan manusia dari fungsi utamanya di dunia.

Dengan demikian pandangan dan sikap terhadap situs peninggalan yang dianggap keramat itu merupakan nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan dan nilai budaya itulah yang merupakan pandangan hidup bagi sebagian besar orang Jawa. Apa yang dimaksud dengan pandangan hidup disini adalah suatu abstraksi dari pengalaman hidup yang dibentuk oleh suatu cara berpikir dan akhirnya merupakan suatu pedoman yang dianut oleh seseorang atau akan dapat mengembangkan suatu sikap terhadap ritual terhadap hidup (Geerts;1998). Berdasarkan beberapa fenomena yang ada tentang perilaku elit politik yang memilih melakukan ritual khusus dalam upaya mendapatkan sebuah posisi. Menarik untuk ditelusuri lebih dalam bagaimana praktek ritual politik yang dilakukan para politisi di beberapa situs peninggalan kuno sebagai bentuk kekuatannya

dengan dasar betapa kuat pengaruh mistis yang ada disana salah satunya yang berada di Kabupaten Malang.

BAB II

SISTEM KEPERCAYAAN, NILAI DAN SIKAP



Kami yakin dan sadar bahwa datang berkunjung ke situs yang ada itu sebagai bukti kalau kekuatan yang tidak terlihat ini juga ada, karena ini adalah budaya yang sudah sejak lama terjadi

“Salah satu politisi yang berkunjung”

Kepercayaan dapat dipandang sebagai kemungkinan subyektif yang diyakini individu bahwa suatu obyek atau peristiwa memiliki karakteristik. Kepercayaan melibatkan hubungan antar obyek yang dipercayai dan karakteristik yang membedakannya. Derajat kepercayaan kita mengenai suatu peristiwa atau

suatu obyek yang memiliki karakteristik tertentu menunjukkan tingkat kemungkinan subyektif seseorang dan konsekuensinya juga menunjukkan kedalaman atau intensitas kepercayaannya. Semakin pasti dalam kepercayaan, semakin besar pula intensitas kepercayaan tersebut. Budaya memainkan suatu peranan penting dalam pembentukan kepercayaan. Apa yang diterima tergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman kita. Dalam komunikasi antar budaya tidak ada hal yang benar atau hal yang salah sejauh hal-hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan (Mulyana, 2005:24-27).

Nilai-nilai adalah aspek evaluatif dari sistem-sistem kepercayaan, nilai dan sikap. Dimensi evaluatif ini meliputi kualitas-kualitas seperti kemanfaatan, kebaikan, estetika, kemampuan memuaskan kebutuhan dan kesenangan. Meskipun setiap orang mempunyai suatu tatanan nilai yang unik, terdapat pula nilai-nilai yang cenderung menyerap budaya. Nilai-nilai ini disebut nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya biasanya berasal dari isu-

isu filosofis lebih besar yang merupakan bagian dari suatu *milieu* (lingkungan pergaulan) budaya. Nilai-nilai ini umumnya normatif dalam arti bahwa nilai-nilai tersebut menjadi rujukan seseorang anggota budaya tentang yang baik dan apa yang buruk, yang benar dan yang salah, yang sejati dan palsu, positif dan negatif dan sebagainya. Nilai-nilai budaya menentukan bagaimana orang layak mati dan untuk apa, apa pantas dilindungi, apa yang menakutkan orang-orang dan sistem sosial mereka, hal-hal apa yang patut dipelajari dan dicemoohkan dan peristiwa-peristiwa apa yang menyebabkan individu-individu memiliki solidaritas kelompok. Nilai-nilai budaya juga menegaskan perilaku mana yang penting dan mana yang harus dihindari (Mulyana, 2005:24-27).

Nilai-nilai budaya adalah seperangkat aturan yang terorganisasikan untuk membuat pilihan dan mengurangi konflik dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya menampakkan diri dalam perilaku para anggota

budaya yang dituntut oleh budaya itu. Individu melaksanakan perilaku normatif, ada juga individu yang tidak. Orang yang tidak berperilaku normatif mungkin mendapat sanksi informal atau sanksi yang sudah dibakukan. Perilaku normatif juga tampak pada perilaku sehari-hari yang menjadi pedoman individu dan kelompok untuk menghindari konflik. Kepercayaan dan nilai memberikan kontribusi bagi pengembangan dan sisi sikap.

Sikap adalah suatu kecenderungan yang diperoleh dengan belajar untuk merespon suatu obyek secara konsisten. Sikap itu dipelajari dalam suatu konteks budaya. Bagaimana lingkungan budaya kita itu turut membentuk sikap dan kesiapan kita untuk merespon dan akhirnya perilaku kita. (Mulyana, 2005:24-27). Salah satu komponen penting dalam sistem religi adalah ritus dan upacara. Sistem ritus dan upacara dalam suatu religi berwujud aktivitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan kebaktiannya terhadap Tuhan, Dewa-

Dewa, roh nenek moyang, atau makhluk halus lain, dan dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan penghuni dunia gaib lainnya.

Ritus atau upacara religi biasanya berlangsung berulang-ulang, baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. Tergantung dari sisi acaranya, suatu ritus atau upacara religi biasanya terdiri dari suatu kombinasi yang merangkainkan satu-dua atau beberapa tindakan, seperti, berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari dan menyanyi, berprosesi, berseni-drama suci, berpuasa, intoksikasi, bertapa dan bersamadi (Koentjaraningrat, 1987 : 81).

Mengkaji ritual adalah hal yang penting, apalagi ritual adalah bentuk simbolik dari tindakan religi dan magi. Mengenai ritual, menurut Victor Turner, ritual dapat diartikan sebagai prilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berbeda, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis. Melainkan menunjuk pada tindakan yang didasari oleh

keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis.

Dari hasil penelitiannya, Turner telah merumuskan dua hal yang sangat penting bagi kajian antropologi, yaitu: (1) rumusan secara umum tentang teori antropologi simbol dalam kajian ritual dan agama, dan (2) kajian secara deskriptif tentang aspek-aspek ritual (Soehadha, 2006:207). Ritual merupakan salah satu perangkat tindakan nyata dalam beragama, seperti pendapat Winnick (Syam, 2005: 17) ritual adalah "*a set or series of acts, usually involving religion or magic, with the sequence established by traditio*", yang berarti ritual adalah seperangkat tindakan yang selalu melibatkan agama atau *magi*, yang dimantapkan melalui tradisi. Hal tersebut senada dengan pendapat yang diungkapkan Geertz (Rostiyati, 1994 : 1) adanya *ritus*, selamatan atau upacara ini merupakan suatu upaya manusia untuk mencari keselamatan, ketentraman, dan sekaligus menjaga kelestarian *kosmos*. Selamatan ini pada hakekatnya

merupakan upacara keagamaan yang paling umum di dunia dan melambangkan kesatuan *mistis* dan sosial dari mereka yang ikut hadir di dalamnya. Melalui upacara ritual atau selamatan masyarakat berharap rasa aman dan tidak terjadi bencana.

Menurut Bustanuddin (2006:97) *ritus* berhubungan dengan kekuatan supranatural dan kesakralan sesuatu. Kerena itu istilah *ritus* atau ritual dipahami sebagai upacara keagamaan yang berbeda sekali dengan yang *natural*, *profan* dan aktivitas ekonomis, rasional sehari-hari. Ritual dilakukan sebagai salah satu sarana mencari keselamatan dan bukti nyata tentang keyakinan yang dimiliki oleh kelompok atau anggota masyarakat tentang adanya kekuatan yang Maha Dahsyat di luar manusia. Ritual juga merupakan bentuk rasa hormat kepada Tuhan, Dewa, Leluhur, dan roh-roh.

Menurut Koentjaraningrat, (2002 : 204) upacara *religi* atau ritual adalah wujudnya sebagai sistem keyakinan, dan gagasan tentang Tuhan, Dewa-Dewa,

Roh-roh halus, Neraka, Surga dan sebagainya, tetapi mempunyai wujud yang berupa upacara-upacara. Mistik adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan perantara memuja roh dan kekuatan lain yang dapat mendatangkan keselamatan hidup. Stange (1998: 119) menyatakan bahwa

Mistik merupakan fenomena psikis dan gaib yang mengacu pada kebatinan, spiritual dalam pengalaman religius, atau mengacu pada kepercayaan dalam aktivitas hidup, berkaitan dengan praktek-praktek yang berakar pada tradisi kearifan spiritual pribumi yang sudah tua usianya.

Kepercayaan merupakan paham yang secara keseluruhan dalam adat istiadat sehari-hari dari berbagai suku bangsa yang percaya dengan nenek moyang. Menurut Endraswara (2003: 29)

Kepercayaan sumbernya menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, adapun pelaku budaya itu yang berusaha untuk

mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepercayaan bahwa pengetahuan tentang hakikat Tuhan dengan melalui kesadaran spiritual yang dilakukan para pelaku ritual mistik untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan.

Dari beberapa pendapat, mistik juga dapat diartikan sebagai cinta kepada Yang Mutlak, suatu upaya yang mencerminkan hasrat jiwa manusia yang ingin mengenal dan mendapatkan kesadaran langsung dari kebenaran mutlak. Mistik merupakan wacana budaya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Konsep kekuasaan mendasar di dalam ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik khususnya. Permasalahan yang terdapat dalam politik tidak terlepas dari permasalahan kekuasaan yang merupakan sentral permasalahan di dalam politik. Setiap individu memiliki peluang untuk memiliki kekuasaan tergantung besar modal sosial yang

dimiliki, bagaimana seorang dapat memengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginannya hal tersebut tidak lain bagian kecil dari kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai *power* di dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Menurut Michael Foucault dalam Wahid, (1993:39-40), "kekuasaan bukan merupakan sesuatu yang ada, kekuasaan sama dengan banyak relasi kekuasaan yang bekerja di salah satu ruang atau waktu, kekuasaan secara *konvensional* dipahami bahwa kekuasaan itu menindas, menjadi kekuasaan itu memproduksi kebenaran".

Melihat kekuasaan tidak berdiri sendiri dengan banyak relasi, serta kekuasaan dipahami menindas menuju arah kekuasaan memproduksi kebenaran ketika kekuasaan dipandang secara *konvensional*, kekuasaan memungkinkan tindakan-tindakan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat seolah benar. Menurut Michael Foucault (2006:19): "Pengetahuan

dan kekuasaan bukanlah entitas yang berbeda. Kebenaran pengetahuan sebenarnya bukan masalah kesesuaian pikiran (teori) dengan realitas diluar pikiran tapi masalah bagaimana *form of knowleged* ilmiah ataupun dibentuk aturan lain khusus yang berupa proporsi, dapat dinyatakan dalam suatu perbincangan, kebenaran merupakan pengetahuan adalah masalah politik *diskursus* (masalah kekuasaan). Menurut Michael Foucault Kebenaran merupakan efek dari suatu hubungan kekuasaan yang membentuk suatu kehidupan tertentu, kekuasaan merupakan berbagai bentuk orang untuk terikat di dalam suatu sistem kekuasaan/pengetahuan yang intinya bersifat semena-mena.

Memurut Samuel P. Hutinggton (2007:10) Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mengubah perilaku orang lain atau kelompok lain yang dapat dilakukan secara *persuasive, koersif*, atau dengan teguran. *Power*

mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginan tertentu baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar.

Menurut Michael Foucault dalam Saifuddin, (2011: 210) “kekuasaan sebagai *authority* (otoritas)”. Maka kekuasaan biasanya dianalogikan dengan sistem birokrasi (pemerintahan) dalam masyarakat yang bersangkutan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan warga masyarakat, kecuali dalam hal menerima konsekuensi kekuasaan. Konsep manusia sebagai makhluk berpikir dan bertindak kekuasaan *authority* harus dibedakan dari kekuasaan *power*.

Berdasarkan konsep ini kekuasaan berada pada semua orang bahkan seorang pengemis sekalipun. Kekuasaan memberikan peluang orang ataupun kelompok untuk dapat memiliki posisi menentukan kebijakan dan keputusan publik, hal ini memungkinkan posisi kekuasaan menjadi kompetisi elit politik untuk memperolehnya. Sangat penting

makna kontestasi dan kekuasaan apabila kedua kata ini digabung menjadi satu yaitu kontestasi kekuasaan, relevan bagi memahami kondisi negeri kita dan juga relevan untuk memahami kondisi di Jawa.

Konsep kontestasi kekuasaan dengan cepat diterapkan dalam lapangan praktis, khususnya politik praktis sebagai contoh bermunculnya pemekaran daerah, persengketaan batas wilayah, *revitalisasi* aturan adat, lahirnya kembali konsep putra daerah, maraknya aliran agama-agama baru, bentrokan antara penganut agama, fenomena upaya pelepasan diri dari NKRI dan sebagainya.

Politik merupakan seni dalam mempengaruhi orang lain, politik bukan hanya dapat dilakukan oleh penguasa, dimana anak bayi sekalipun dapat berpolitik dengan demikian politik memiliki makna yang sangat luas. Menurut Machiavelli dalam Hertanto (2006:2), "politik merupakan "*the ends justify the means*" (tujuan menghalalkan banyak cara)".

Menurut Harold Lasswell dalam Ramlan Surbakti (1992;1), “merumuskan politik sebagai “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia hidup dalam politik, hanyadalam politik manusia dapat memperoleh sikap moral yang tinggi, dengan urusan-urusan yang mencakup masyarakat banyak dibicarakan, diperdebatkan, dan menentukan tindakan-tindakan untuk kebaikan bersama sebagai kepentingan umum.

Elit politik merupakan bagian terpenting sebagai wadah yang menggunakan *power* politik untuk melakukan tindakan-tindakan politik. Elit politik adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kontrol proses politik dan konsekuensi-konsekuensi kebijaksanaan orang-orang yang langsung dalam menghasilkan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Gabriel A. Almond (2005:25) mengaitkan

budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen yaitu: Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang santri terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya (Kantraprawira, 2005 : 25).

Komponen afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau

menolak sistem politik itu. Komponen Evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Eagly dan Chaiken mengemukakan bahwa sikap seorang santri dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek politik, yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku (Kantraprawira, 2005).

BAB III

“ NYUWUN ”

“

Akan sangat aneh ketika kami dikunjungi namun tidak memberikan suara apapun, hanya datang meminta restu dan “nyuwun” doa supaya dilancarkan “ Tokoh Agama Yang Pernah Didatangi Politisi ”

Dinamika perubahan sosial politik banyak terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut menciptakan berbagai macam diskursus bahkan problematika sosial. Pandangan yang demikian ini nyatanya juga membentuk relasi kekuasaan baru.(Saputro, 2018) Dimana relasi ini melibatkan dua hal yang menjadi perdebatan publik. Tentang agama yang dipaksakan idealismenya masuk dalam dunia

politik.(Zawawi et al., 2015) Bentuk idealisme agama yang ada seperti halnya yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang menyatakan bahwa negara Indonesia harus menggunakan sistem khilafah. (Nasional.kompas, 2018) Masalah tersebut tentu tidak sekali dua kali muncul, melainkan wacana yang terus bergulir dikarenakan Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Problematika ini tidak hanya berada di pusat, melainkan dalam tataran lokal dimana tokoh agama memiliki fungsi kekuasaan yang berbeda.(Aswar, 2015)

Kekuasaan tokoh agama memang memiliki pengaruh tersendiri bagi masyarakat. Dimana kekuasaannya terdapat pada struktur sosial dan budaya sekitar. Terutama tokoh agama muslim di wilayah pedesaan.(Jannah, 2015) Banyak masyarakat yang menyebut tokoh agama muslim itu sebagai kyai kampung. Tokoh agama selain memiliki pengaruh sosial juga memiliki pengaruh dalam politik. Sebagai

pemilik kekuasaan keagamaan, relasi tokoh agama dan masyarakat tidak hidup dalam struktur sosialnya saja, namun juga dalam ranah politik. Terlebih dalam memetakan kekuatan politis masyarakat sekitar. Karena inilah tokoh agama disejajarkan dengan elite lokal yang berada ditengah struktur sosial dan kultural masyarakat. Sehingga figur ini begitu disanjung dan dihormati seperti kyai yang memiliki pondok pesantren. Oleh karena itu sangat masuk akal apabila banyak masyarakat yang mengikuti langkah-langkahnya.(Chalik, 2015)

Tokoh agama dengan status sosial tinggi, kemudian menjadi elit lokal yang memiliki relasi serta kekuasaan dan akhirnya masuk ke dalam struktur organisasi politik. Tahapan inilah yang menjadikan tokoh agama sebagai komoditas partai politik. Dimana partai politik mencari calon kepala daerah yang diusung melalui figur-figur daerah yang memiliki kekuatan serta kekuasaan. Seperti yang

sudah dilakukan dalam penelitian yang ada, kyai memiliki peran berkaitan dalam tindakan politik.

Pertama, merupakan *patronase* bagi masyarakat dimana kyai memiliki fungsi untuk menentukan pilihan politik masyarakat sekitar dimana dirinya tinggal. Kedua, sebagai elit politik dimana ulama tersebut masuk dan bergabung di dalam struktur organisasi partai. Ketiga, kyai sebagai mediator politik dimana memiliki fungsi sebagai penengah apabila terjadi konflik. (Nurhadi, 2017) Perilaku ulama dalam politik tidak bisa dikesampingkan manfaatnya, sebagai bentuk simbol elit lokal. (Halim, 2014, p. 51) Seperti yang terjadi di Bantaeng tentang kemenangan Nurdin Abdullah ini menjadi proses berputarnya elit politik dengan basis non trah atau kalangan massa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dengan penguatak karakter dan kualitas personal yang kuat dapat menciptakan pola kekuasaan.(Haboddin, 2020)

Peran serta membangun jaringan sangat dibutuhkan. Meminjam penjelasan Gaventa tentang teori yang digunakan. Perilaku yang dilakukan ulama sebagai elit lokal yang memiliki kontrol, peran serta relasi kekuasaan. Kerangka pemikiran ini sesuai dengan Teori Powercube atau kubus kekuasaan dimana ulama menggunakan kekuasaannya sebagai control seseorang dan kelompok terhadap individu serta kelompok lain. Disampaikan juga oleh Gaventa, bahwa bentuk relasi kekuasaan dalam kerangka pemikiran itu terletak pada tiga bentuk kekuasaan, yaitu wilayah level, ruang dan bentuk. (Gaventa, 2006, p. 23)

Dalam wilayah level, posisi Ulama yang memiliki kekuasaan yang tinggi di masyarakat. Dimana kekuasaan informalnya dapat menjangkau masyarakat untuk patuh pada petunjuk yang disampaikan. Pada wilayah ruang, para ulama memanfaatkan wilayah mereka pada tataran pondok

pesantren serta organisasi keagamaan yang di ikuti untuk menegaskan kekuatannya. Semakin besar pondok pesantren serta ormas keagamaan yang dipimpin, maka jamaahnya juga semakin besar tentu dapat meningkatkan animo untuk dipilih. Dalam ranah bentuk, kekuasaan ulama atau elit agama ini membawahi bidang agama serta sosial, secara bentuk kekuasaan sudah mendapatkan sejak diri mereka mendapatkan pengakuan.

Oleh karena itu tidak jaranga banyak masyarakat yang berujar, “ *nderek pak yai* “. Perilaku tersebut sebagai bukti bentuk kekuasaan yang ada. Keberhasilan tokoh agama memimpin masyarakat sekitar menunjukkan semakin berpengaruhnya nilai agama dalam otoritas membangun lingkungan sosialnya.(Mahadi, 2015) Dimana tanpa harus dikordinasi, masyarakat tergerak langung serta merasakan dampak emosionalnya.

Dalam stratifikasi sosial, posisi tokoh agama atau ulama memiliki keistimewaan posisi di masyarakat. Bisa sebagai tokoh yang dituakan dan orang yang mengerti segala hal. Oleh karena itu dalam tradisi yang ada, sebagian masyarakat menyebut tokoh agama/ulama ini sebagai pimpinan informal. (Azra, 1990). Tokoh agama atau ulama ini bukan hanya memimpin kegiatan keagamaan yang sehari-hari bersifat ritual, melainkan juga aktivitas lain yang mendukung kehidupan sosial masyarakat desa. Seperti halnya yang dikatakan oleh M. Natsir, sebelum masyarakat Indonesia mengenal tokoh pimpinan formal seperti saat ini, masyarakat Islam desa sudah mempunyai dan mengenal pemimpin lokal yang memiliki relasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kyai. (Yafie, 1989) Dimana pemimpin informal ini menjadi rujukan segala permasalahan yang ada. Semua itu karena

adanya kepercayaan yang telah dibangun sejak lama terhadap para tokoh agama. (Natsir, 1973, p. 163)

Relasi yang terbentuk antara ulama dan masyarakat menyebabkan terjadinya pertukaran sosial. Dimana masyarakat menghormati dan menjadikan panutan. Dari sini posisi ulama semakin tinggi dalam struktur sosial yang ada. Adanya pengaruh secara tidak langsung dengan menghargai dan menghormati para ulama, menunjukkan kekuasaan yang terbentuk tidak lahir begitu saja. (Hannan & Abdillah, 2019) Semua ini karena perilaku sosial ulama yang senantiasa hidup berdampingan menjaga keteraturan nilai serta norma agama yang ada. Ini terjadi dalam kurun waktu yang lama dimana tindakan sosial yang dilakukan tidak memiliki tendensi pamrih. (Graaf, 1970) Oleh karena itu, kekuasaan yang terbentuk memiliki otoritas serta pengaruh dengan sendirinya.

Kekuasaan politik tokoh agama menciptakan konfigurasi baru di dalam pemetaan politik lokal. Perwujudan ini terjadi di beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilu pada serentak tahun 2020. Seperti halnya petahana yang maju kembali untuk dapat menjadi pemimpin daerah. (Nuryansah, 2014)

Konfigurasi politik lokal nampak ramai diperbincangkan, khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Tsunami politik yang melanda Malang Raya tentu berdampak pada keterlibatan ulama yang sangat dominan. Keterlibatan itu dengan memegang kendali atas kekuatan sosial serta politik di daerahnya. Oleh karena itu tidak jarang ulama ini menentukan kemenangan atas para elit lokal yang mencalonkan diri ikut dalam Pemilu. (Malangtimes, 2020)

Perilaku para politisi dalam lingkaran ritual politik ada menyebutkan bahwa keterlibatan elit lokal yang memiliki afiliasi agama dapat menentukan

besaran dukungan serta partisipasi pemilih. Secara tidak langsung ini dikhususkan pada ulama yang memberikan dukungan serta ulama yang terlibat langsung dalam pencalonan pemimpin daerah. Sejatinya hanya menjelaskan relasi kekuasaan tokoh agama yang merupakan elit politik lokal. Dimensi tersebut membantu penulis untuk dapat menemukan pemetaan ulama dan para aktor politik yang berperan. Menemukan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi serta adanya perubahan-perubahan sosial politik yang muncul. Lantas apakah memang benar bahwa berkunjung bukan hanya sekedar minta dukungan, melainkan doa-doa yang bisa di *rapalkan*.

BAB IV

BUDAYA ELIT POLITIK DALAM MENCARI DUKUNGAN

“

Nampak suatu ketika ada beberapa Tokoh Penting disini datang mengunjungi situs pada malam hari. Kemudian tidak lama tercium aroma-aroma seperti halnya upacara keagamaan tertentu.

“Juru kunci sebuah situs “

Mendatangi situs merupakan perilaku yang berhubungan dengan kepercayaan pada hal-hal yang mengandung rahasia. Adanya perilaku mendatangi situs merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Mulai dari rakyat kecil sampai pejabat, pengusaha sampai politisi juga seringkali melakukan hal tersebut. Dengan tujuan untuk mencari jodoh, menang pemilu/

pilkada, naik jabatan, bahkan sampai hal-hal yang berbau negatif seperti santet. Tidak terkecuali dalam konteks politik, banyak politisi yang mendatangi paranormal, situs, punden untuk meminta pertolongan secara mistis. Sebagaimana salah satu juru kunci mengatakan:

“yang datang kesini untuk meminta bantuan saya itu banyak sekali mbak, ada karyawan biasa, manajer bahkan politisi juga ada, yang diminta juga macem-macam ada yang pengen naik jabatan, mempertahankan jabatan bahkan ada yang minta aji pengasih, macem-macam kok mbak tergantung problem yang dihadapi oleh orang itu”

Hal serupa juga dikatakan oleh Mbah Wondo yang mengatakan:

“banyak juga yang kesini, ada pedagang yang tanya tentang kemajuan usahanya ke depan, ada mahasiswa dengan permasalahan asmara bahkan ada juga kok politisi yang kesini minta dilihatkan jika dia nyalon nanti bisa jadi apa nggaknya”

Berdasarkan dari pernyataan di atas, para elit yang berasal dari beragam profesi masih saja menggunakan cara-cara tradisional untuk bisa keluar dari segala problematika yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan paranormal / orang pintar sebagai salah satu jalan. Para aktor politik mendatangi paranormal dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda ada yang ingin membuat lawannya tak berkutik, ada yang ingin terus melanggengkan kekuasaannya, ada yang karena masalah rumah tangga ada juga yang ingin jabatannya dalam partai meningkat. Sebagaimana Elit partai X mengatakan:

“ banyak dari teman-teman saya yang mendatangi situs ini agar persoalannya dapat terselesaikan, ada yang mendatangi paranormal karena suaminya kecantol sama wanita lain, ada yang ingin terlihat berwibawa dengan cara susuk aura ada juga supaya kedudukannya bisa naik, kalau saya sendiri pernah juga mendatangi paranormal iseng sih awalnya tapi ternyata berhasil juga, bukan untuk tujuan politik tapi banyak juga kok

teman-teman politisi yang datang ke paranormal untuk keberhasilan hajat politiknya, tergantunglah toh tidak semua politisi harus datang ke paranormal untuk menyelesaikan problem politisnya. Hanya saja kebanyakan memang begitu”

Gambaran tentang betapa pentingnya untuk mendatangi paranormal dalam upaya kegiatan politik memang menjadi alternative pilihan yang mudah. Elit politik cukup datang ke sebuah situs disana mereka aja diarahkan oleh juru kunci sesuai dengan permintaan mereka. Minimnya pengetahuan politik seorang elit menjadikan praktek ini masih terus berlanjut.

Ketamakan pada jabatan membuat banyak politisi menghalalkan segala kegiatan, untuk bisa merebut atau mempertahankan jabatan. Karena umumnya mesin partai tidak berjalan dan para calon tidak betul-betul memahami aspirasi konstituennya sendiri, mereka pun “terjebak” untuk menggunakan

cara-cara lain. Mulai dari main uang (*money politics*), mengeksploitasi atau memperlalat simbol-simbol keagamaan dan primordial, serta terakhir memanfaatkan jasa “*dukun-dukun politik atau bahkan mendatangi situs angker*”. Praktek inilah yang telah terjadi di beberapa situs di Kabupaten Malang tersebut.

Dalam dunia modern yang semakin diukur dengan nilai-nilai material, elite politik memiliki hasrat besar untuk memiliki, menguasai, dan mengeksploitasi berbagai sumberdaya: uang, harta benda, tanah, properti, dan mobil mewah. Semua itu diyakini akan diperoleh melalui penguasaan jabatan-jabatan strategis dan pos-pos basah di birokrasi pemerintahan, parlemen, kehakiman, kepolisian, perpajakan, bea cukai, dan sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh AY, Anggota Tim Pemenangan salah satu Kandidat, dijelaskan bahwa

“ posisi dalam sebuah partai itu menentukan nomor urutan saat pemilihan legislative, bukan hanya melalui jalur resmi untuk memilih nomor sesuai keuangan kandidat, tapi mau gak mau seorang calon wajib dia punya pegangan berupa cincin ,keris kecil atau kalung yang disimpan di dalam tas. Jaman sekarang gak pake pegangan ya kalah. Jadi dukun politik wajib menemani calon sebagai upaya penjaga sang calon dari hal ghaib yang dilakukan oleh lawan politiknya.”

Posisi menentukan prestasi, itulah yang sering digunakan seorang elit ketika ingin melanggengkan jabatannya. Simbol simbol yang berupa keris, cincin, kalung dan berupa jimat lain sangat diperlukan sebagai bentuk kepercayaan seseorang terhadap tuah ghaib benda itu. Dalam perbincangan tersebut terungkap bahwa ramai politisi di negeri ini, tak terkecuali para calon legislatif (caleg) yang menggunakan jasa dukun untuk mencapai tujuannya.

Di samping itu juga terungkap bahwa dalam

menjalankan aksinya para dukun politik memasang tarif yang beragam sebagai mahar (imbalan) jika aksinya berhasil. Mahar tersebut bisa mencapai ratusan juta, milyaran dan bahkan triliyunan rupiah, sesuai dengan tingkat jabatan politik yang diinginkan. Meskipun ramai politisi yang menggunakan jasa dukun untuk memuluskan karir politiknya, namun sebagaimana dikemukakan oleh seorang pematari (politisi partai X) dalam acara tersebut bahwa tidak semua politisi menggunakan jasa dukun, seperti partai yang disebut-sebut memiliki wirid khusus sebagai ganti penggunaan jasa dukun. Di samping itu, juga disebutkan bahwa politisi partai-partai Islam memiliki tradisi tersendiri dalam memenangkan pemilu, di antaranya meminta doa restu kepada para ulama dan pimpinan pesantren.

Dalam upaya menguasai jabatan-jabatan yang menjanjikan kemakmuran material itu, elite politik pun meminta dukungan dan memanfaatkan jasa-jasa

dukun politik, “orang pintar,” paranormal, penasehat spiritual, dan sebagainya. Elite politik rela membayar mahal dan menjalankan ritual-ritual tertentu demi memperoleh dan mempertahankan jabatan. Bahkan ada juga “jimat-jimat” yang diberikan oleh dukun susuk, untuk memberikan jaminan kewibawaan, pesona, kecintaan, atau dukungan dari rakyat, konstituen, atau massa pendukung. Selain itu, dukun juga diperlukan untuk melindungi elit politik dan keluarganya dari serangan sihir, santet, teluh, tenung dari musuh-musuh politik, yang ingin mencelakakan atau membunuh saingan politiknya.

Dijelaskan kemudian oleh Tim Pemenangan Partai X bahwa, :

“ di situs Peninggalan Singosari itu pasti ada tuah ghaibnya, nah dukun politik cuma menjelaskan harus bagaimana dan caranya seperti apa. Sang juru kunci cuma mengantarkan tapi klo masalah ritual yah bersifat pribadi sesuai dengan kepercayaan “.

Di antara pesan menarik yang berhasil penulis catat dalam perbincangan tersebut adalah statemen yang dilontarkan oleh tim pemenangan Partai X yang menyatakan bahwa penggunaan jasa dukun di Indonesia adalah bagian dari budaya. Tidak hanya itu, beliau juga mengklaim bahwa dukun adalah orang-orang mulia. Jika yang dimaksud penggunaan jasa dukun sebagai budaya Indonesia pra-Islam, maka hal tersebut benar, tapi statemen yang dijelaskan akan menjadi keliru jika penggunaan jasa dukun dianggap sebagai budaya Indonesia pasca masuknya agama Islam. Artinya, jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, telah hidup dan berkembang ajaran Dinamisme, Animisme, Hindu dan Budha, di mana dalam kepercayaan tersebut penggunaan jasa dukun merupakan hal yang lumrah. Namun setelah Islam bertapak di Indonesia, dan lahirnya para ulama semisal Wali Songo, maka budaya perdukunan telah

mulai dilarang oleh para ulama karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Meskipun sampai saat ini masih ada umat muslim di Indonesia yang menggunakan jasa dukun, namun fenomena tersebut tidaklah bisa dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan praktek perdukunan, apalagi jika hendak disebut sebagai sebuah budaya. Dalam pandangan penulis, secara umum masyarakat kita bersikap ambigu terhadap perdukunan. Di satu sisi, dukun dianggap sebagai musuh yang harus dibasmi, sebagaimana telah kita lihat ada dukun yang dibunuh dan rumahnya dibakar. Kasus seperti ini sering menimpa para dukun yang diduga menggunakan ilmu santet. Namun di sisi lain, dalam kondisi tertentu sebagian masyarakat justru menggunakan jasa dukun untuk memperoleh keberuntungan tertentu seperti halnya para caleg yang menggunakan jasa dukun dengan bayaran tinggi hanya untuk memenangkan

pertarungan politik. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa bagi sebagian masyarakat Indonesia, dukun adalah seorang sahabat sejati sekaligus juga musuh bebuyutan. Sebuah cerminan sikap yang ambigu dan paradoks.

Elit politik yang berasal dari Jawa belum sepenuhnya meninggalkan tradisi dan budaya yang diyakininya. Diantara tradisi dan budaya ini terkadang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Tradisi dan budaya salah satunya adalah keyakinan akan adanya roh-roh leluhur yang memiliki kekuatan ghaib, keyakinan akan adanya dewa-dewi seperti Tuhan, melakukan upacara-upacara ritual yang bertujuan untuk persembahkan kepada Tuhan atau meminta berkah serta terkabulnya permintaan tertentu dengan mengunjungi/ ziarah ke makam. Situs peninggalan kerajaan Singhasari misalnya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gus X selaku mantan caleon legislatif:

“Pada umumnya masyarakat Malang memang seringkali melakukan ritual jika akan menghadapi atau mempunyai hajat tertentu semisal jika seseorang ingin menggelar acara pernikahan untuk anaknya jika acara itu ingin berjalan lancar tanpa ada halangan apapun, maka orang tersebut akan datang ke candi dan sumberawan untuk melakukan ritual ada yang membawa makanan, ada yang pakai dupa ada juga yang naruh uang seribuan disekitar kolam. Bagi sebagian masyarakat sini yang percaya pada hal berbau mistis jika hal itu tidak dilakukan maka, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah kepercayaan yang sampai saat masyarakat jawa khususnya Malang ini”

Tidak hanya dengan mendatangi situs yang dianggap keramat, namun dunia supranatural merupakan suatu hal yang sangat umum dikalangan masyarakat termasuk pada elit politik. Wujud inilah yang dimaknai sebagai suatu tindakan rasional dari seorang individu menurut Geertz. Dunia supranatural seringkali dipercayai oleh masyarakat dalam kemampuannya untuk menyelesaikan suatu

problem yang dihadapi. Paranormal merupakan sosok yang dikenal dengan orang yang memiliki kekuatan supranatural dan memiliki hubungan dengan makhluk dari dunia supranatural itu.

Sebagaimana diungkap oleh Mbah Noer selaku paranormal mengatakan:

“selain mendatangi makam atau situs, memang masyarakat sini kebanyakan masih saja mendatangi paranormal untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang membelit mereka. Setelah mendatangi saya, biasanya memang saya menyuruh mereka juga mendatangi makam dan situs keramat di singosari dengan membawa bungkusan yang saya berikan kepada orang tersebut untuk lebih baiknya, mengingat kebanyakan dari kita menganggap keramat makam tersebut”

Ritual-ritual tradisional yang dimodifikasi dengan unsur-unsur keagamaan tertentu masih saja dilakukan oleh masyarakat pada era modern ini. Tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya, aktor politik sebagai individu yang berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan

dengan menggunakan institusi atau organisasi sebagai wadah juga mendatangi paranormal untuk dapat mewujudkan keinginannya dalam memperoleh pengaruh dalam pembuatan regulasi dalam organisasi tersebut.

Guru supranatural atau paranormal dianggap sebagai orang yang mampu mewujudkan keinginannya sehingga para pelaku politik yang mendatangi akan meniru atau berbuat sepenuhnya terhadap apa yang diajarkan oleh guru supranatural mereka. Dalam dunia politik peran ilmu supranatural sangat terlihat ketika para actor atau pelaku politik sedang menghadapi kegiatan yang berbasis politik dan menyangkut hajat politik itu sendiri. Biasanya pelaku politik mendatangi atau meminta bantuan paranormal untuk melancarkan urusannya.

BAB V

ELIT DATANG MENUJU SITUS

“

Datang ke situs inilah yang saya harapkan bisa menjadi bentuk kedekatan saya dengan para masyarakat yang dekat dengan situs itu sebenarnya, perkara dilihat lain yang saya yakini kalau saya akan maju dari daerah tersebut dan butuh dukungan.” Kata Salah Satu Politisi

Bagi elit politik situs-situs yang berada di Kabupaten Malang tentu saja merupakan tempat yang memiliki kesucian dan pantas dihormati. Situs sebagai tempat peristirahatan bagi arwah nenek moyang dan keluarga yang telah meninggal.

Keberadaan makam dari tokoh tertentu menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ziarah dengan berbagai motivasi. Kunjungan ke makam pada dasarnya merupakan tradisi agama Hindu yang pada masa lampau berupa pemujaan terhadap roh leluhur. Candi pada awalnya adalah tempat abu jenazah raja raja masa lampau dan para generasi penerus mengadakan pemujaan di tempat itu. Makam, terutama makam tokoh sejarah, tokoh mitos, atau tokoh agama, juga merupakan tujuan wisata rohani yang banyak dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti yang dijelaskan oleh GY alasan kenapa datang di sumberawan, bahwa,

“Pernah mas yang saya sebutkan tadi saat mandi ruwatan minum air suci di candi sumberawan. Disana sering dijadikan jujukan karena airnya yang merupakan tempat sembunyinya kendedes setidaknya akan memberikan berkah yang sama bisa terlihat jauh lebih menarik. Kalo di candi singosari yah

ritualnya biasa mas selamatan untuk mendapatkan tuah ghaib raja Singosari waktu itu. Dan yang paling penting pengambilan pusaka disana untuk pegangan”

Ziarah situs merupakan satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam budaya Jawa. Berbagai maksud dan tujuan maupun motivasi selalu menyertai aktivitas ziarah. Ziarah kubur yang dilakukan oleh orang Jawa ke makam yang dianggap keramat sebenarnya akibat pengaruh masa Jawa-Hindu. Pada masa itu, kedudukan raja masih dianggap sebagai titising dewa sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seorang raja masih dianggap keramat termasuk makam, petilasan, maupun benda-benda peninggalan lainnya.

Kepercayaan masyarakat pada masa Jawa-Hindu masih terbawa hingga saat ini. Banyak orang beranggapan bahwa dengan berziarah ke makam leluhur atau tokoh – tokoh magis tertentu dapat

menimbulkan pengaruh tertentu. Kisah keunggulan atau keistimewaan tokoh yang dimakamkan merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk mewujudkan keinginannya. Misalnya dengan mengunjungi atau berziarah ke makam tokoh yang berpangkat tinggi, maka akan mendapatkan berkah berupa pangkat yang tinggi pula.

Bagi elit politik, ziarah secara umum dilakukan pada pertengahan sampai akhir bulan Ruwah menjelang Ramadhan. Pada saat itu masyarakat biasanya secara bersama-sama satu dusun atau satu desa maupun perorangan dengan keluarga terdekat melakukan tradisi ziarah ke makam leluhur. Kegiatan ziarah ini secara umum disebut *nyadran*.

Para elit datang dengan berbagai tujuan atau motivasi; ngalap berkah, untuk memperoleh kekuatan, popularitas, stabilitas pribadi, umur panjang, mencari rejeki, maupun mencari kebahagiaan bagi anak cucu atau keselamatan hidup.

Hal-hal ini biasanya yang paling umum diharapkan orang apabila berziarah ke makam tokoh mitos terkenal. Secara umum motivasi berziarah dapat digolongkan dalam empat hal meliputi taktyarasa: berziarah dengan tujuan memperoleh berkah dan keteguhan hidup (ngalap berkah); gorowasi: (berziarah ke makam legendaris untuk memperoleh kekuatan, popularitas, stabilitas pribadi, serta umur panjang, mencari ketenangan batin; widiginong: (berziarah dengan tujuan mencari kekayaan dunia maupun jabatan duniawi atau mencari rejeki; samaptadanu: upaya mencari kebahagiaan anak cucu agar selamat atau untuk mencari keselamatan.

Perilaku religius berkaitan dengan ziarah makam masih banyak lagi di berbagai makam keramat yang lain. Candi sebagai salah satu tempat keramat bagi pemeluk Hindu Budha merupakan tempat ziarah yang selalu dikunjungi pada hari-hari atau peristiwa tertentu. Candi tak ubahnya makam,

merupakan tempat persemayaman raja-raja pada masa lampau. Berkaitan dengan ziarah ke makam tidak lepas dari peran tokoh mitos yang sering pula menjadi cikal bakal suatu desa atau daerah tertentu. Banyak upacara adat desa tertentu yang mengaitkan dengan tokoh tertentu yang dimakamkan di sekitar daerah yang bersangkutan. Seperti halnya yang ada Singosari dimana peninggalannya sampai saat ini dikeramatkan. Bagi para elit politik manfaat mendatangi situs dirasa menambah kekuatan juga bisa berkumpul dengan konstutuennya secara ruang lingkup budaya. Seperti halnya yan dilakukan oleh SU yang saat ini menjadi Anggota DPRD bahwa,

“ manfaat mendatangi situs di Singosari memang luar biasa, kekerabatan para penghayat kepercayaan dengan masyarakat Hindu jawa saya rasa bisa membantu dalam mendulang suara di Malang. Selain itu sesuai dengan kepercayaan saya, dengan mendatangi situs keramat, dapat menambah kekuatan aura apabila mandi serta berendam di sumber mata airnya “

Sebagai tempat yang dianggap suci, situs juga merupakan tempat wisata yang pantas untuk dikunjungi. Bagi para elit politik mendatangi situs yang berhubungan dengan air merupakan bentuk praktek ritual tapa kungkum atau semedi bahkan bisa jadi melakukan buka aura disana. Kepercayaan elit politik terhadap kekuatan air dimanfaatkan sebagai pembuka jalan. Para elit berpandangan dengan melalukan ritual disana elit tersebut akan menjadi seorang manusia baru yan telah disucikan dengan air sumber. Selain makna untuk ritual ternyata elit menggunakan sarana itu untuk mendulang suara dikarenakan adanya kekerabatan dengan para pemeluk agama kepercayaan.

BAB VI

RITUALISASI POLITIK SEBELUM BERKONTESTASI



Dalam upaya memaksimalkan kerangka kerja kampanye, sebaiknya memang membutuhkan strategi yang pas sebagaimana daerah yang merupakan basis pemilih ini terdiri dari beberapa macam situs yang dianggap memiliki tuah serta dampak besar secara spiritual...Caleg

Dalam tradisi Jawa yang dilaksanakan elit pada salah satu situs seperti saat ini, ritual politik masih terus dilakukan dalam menghadapi kontetasi politik. Tercatat selama observasi penelitian, Ritual Malam Jemuah yang dilakukan hari Kamis malam hingga Jumat pagi, tidak pernah absen dilaksanakan setiap pekan, berikut Ritual Malam Senin yang

intensitasnya lebih rendah, yang dilaksanakan baik di sanggar sasana panembahan ketika Sumber polaman, atau bahkan di situs-situs cagar budaya seperti candi, petirtan, dan petilasan. Di samping ritual malam Jemuah yang dilaksanakan rutin setiap pekan, ritual tertentu juga dilaksanakan pada malam-malam tertentu dengan melihat hari dan *pasaran*, yaitu sistem tujuh harian dalam seminggu seperti yang kita kenal umumnya (Senin, Selasa, dst..), dengan hari-hari yang dikenal dalam budaya Jawa yang berikutnya disebut *pasaran* (Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage). Ritual-ritual khusus itu seperti malam *Anggara Kasih* (Selasa Kliwon), Jemuah Kliwon, Jemuah Legi, dan pada saat malam bulan purnama yang kemudian disebut sebagai *Ritual Purnama Sidhi*.

Umumnya pada saat Ritual Purnama Sidhi, ritual seringkali diakhiri dengan mandi Tirta Suci dan bunga tujuh rupa di petirtan sekitar wilayah Malang, yang kesemuanya dilakukan dalam tenggang satu

bulan sekali. Selain ritual-ritual yang dilaksanakan dalam interval satu pekan dan satu bulan sekali, tercatat pula pernah dilaksanakan ritual tahunan dan sangat disakralkan oleh penghayat kepercayaan Jawa umumnya dan khususnya, yaitu *Ritual 1 Suro* yang dilaksanakan bertepatan dengan tahun baru Jawa yang berpedoman pada penanggalan Lunar (Kaleidoskop berdasarkan siklus bulan). Selama bulan Suro tersebut, tercatat pula yang sekarang beraktivitas di Wangon, Desa Gunungrejo, Singosari, menemui masa-masa tersibuknya dalam berbagai ritual dan kegiatan, meliputi ritual dan renungan Suro, *penjamasan pusaka, sarasehan budaya, dan ruwatan sukerta*.

Supranatural menjadi sangat terkenal di kalangan para pelaku politik di Indonesia karena secara tidak langsung fenomena adanya dunia supranatural adalah karena kultur budaya asli Indonesia itu sendiri yang sangat kental dengan nuansa atau unsur magis.

Dan ini juga merupakan budaya yang tercipta dari sejak jaman nenek moyang dahulu. Budaya yang masih tradisional ini masih saja dilakukan oleh para aktor politik menyangkut hajat politik mereka. Ini dilakukan untuk melancarkan niat- niat dan ambisi-ambisi untuk mencapai sebuah kemenangan dalam sebuah kedigdayaan atau sebuah kemenangan dalam suatu pemilihan hajat politik. Budaya politik dan dunia supranatural memiliki keterkaitan yang kuat satu dengan yang lain, dimana budaya politik merupakan sistem kepercayaan serta nilai-nilai dan dunia supranatural sebagai pilihan dari tindakan politiknya. Sebagaimana dijelaskan bahwa budaya politik adalah aspek-aspek politik dari sistem nilai yang terdiri dari ide-ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos yang kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat.

Mendatangi paranormal salah satunya merupakan perilaku yang berhubungan dengan

kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak logis. Tindakan yang dilakukan politisi ini dengan perilaku mendatangi paranormal merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Mulai dari rakyat kecil sampai pejabat, pengusaha sampai politisi juga seringkali melakukan hal tersebut. Dengan tujuan untuk mencari jodoh, menang pemilu/pilkada, naik jabatan, bahkan sampai hal-hal yang berbau negatif seperti santet. Tidak terkecuali dalam konteks politik, banyak politisi yang mendatangi paranormal untuk meminta pertolongan secara mistis. Sebagaimana Gus Topik mengatakan :

“yang datang kesini untuk meminta bantuan saya itu banyak sekali mas yoga, ada karyawan biasa, manajer bahkan politisi juga ada, yang diminta juga macam-macam ada yang pengen naik jabatan, mempertahankan jabatan bahkan ada yang minta aji pengasih, macam-macam kok mas tergantung problem yang dihadapi oleh orang itu”⁴⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh (alm) Mbah Noer yang mengatakan:

“banyak juga yang kesini, ada pedagang yang tanya tentang kemajuan usahanya ke depan, ada mahasiswa dengan permasalahan asmara bahkan ada juga kok politisi yang kesini minta dilihatkan jika dia nyalon nanti bisa jadi apa nggaknya”

Berdasarkan dari pernyataan di atas, banyak masyarakat Indonesia pada masa modern seperti ini yang masih saja menggunakan cara-cara tradisional untuk bisa keluar dari segala problematika yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan paranormal sebagai salah satu jalan. Geertz menyebutkan ada beberapa macam dukun atau paranormal seperti misalnya dukun bayi, dukun pijat, dukun yang menggunakan perewangan, atau paranormal ahli pada upacara panen, paranormal susuk. Sedangkan paranormal yang seringkali dimintai bantuan oleh para aktor politik biasanya

paranormal yang menggunakan hal-hal berbau mistis yang dipercaya mampu menyukseskan hajatnya. Para aktor politik mendatangi paranormal dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda ada yang ingin membuat lawannya tak berkutik, ada yang ingin terus melanggengkan kekuasaannya, ada yang karena masalah rumah tangga ada juga yang ingin jabatannya dalam partai meningkat.

Mendatangi paranormal untuk melakukan ritual politik merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh masyarakat. Namun tidak semua permasalahan yang membelit mampu diurai oleh paranormal keberhasilan itu memang ada walaupun tidak sedikit yang mengalami jalan buntu, bahkan tidak berhasil. Sebagaimana YN mengatakan:

“yang namanya usaha itu kadang berhasil ya kadang tidak , kalau segala sesuatu bisa diselesaikan oleh paranormal maka semua itu menjadi tidak berarti. Contoh sederhananya begini, kalau semua orang sakit datang ke paranormal maka rumah sakit pasti sepi, kalau

dalam politik ini misalnya dengan mendatangi paranormal bisa menang ya sudah semua pasti datang ke paranormal nggak ada itu yang namanya konsultan politik. Kan semuanya juga sudah ada yang mengatur”⁵⁰

Demikian pula (alm) Supono juga mengatakan:

“kalo soal berhasil atau tidaknya mereka itu tergantung, bukan kuasa saya sudah ada yang nentukan. Saya Cuma bisa membantu dan mengupayakan soal hasil akhir kembali lagi, tapi kalau banyak yang nggak berhasil pasti tempat saya ini sudah sepi nggak ada yang konsultasi lagi. Bagaimana bisa berhasil semua kalo kadang ada dua orang yang berbeda memiliki tujuan yang sama dan pada wilayah yang sama datang ke saya. Kan nggak mungkin juga. Misalnya mas A minta supaya bisa menang pada pilkades dan mas B juga demikian di kota yang sama pula, kan nggak bisa, lucu memang kalau kadang seperti itu saya Cuma bisa mengiyakan dan saya kasih bacaan do’a-do’a untuk kewibawaan”

Pada dasarnya motif para aktor politik mendatangi Paranormal sebagai *second opinion* yakni

untuk memperoleh solusi/keterangan terhadap problem persoalan yang dihadapi. Persoalan yang dihadapi oleh para actor politik antara lain tentang kekuasaan, jabatan serta problem pribadi dari aktor politik itu sendiri dengan ketidakjelasan terhadap keberhasilan yang didapat nantinya.

BAB VII

JEJAK RITUAL POLITISI



Budaya, mistis dan tradisi berkunjung pada sebuah makam keramat pada masa pemilihan adalah bukti bahwa tradisi ini masih berkembang hingga saat ini. Meskipun banyak daerah keramat di Kabupaten Malang, namun para Politisi memilih situs apa yang akan dikunjungi karena ceritanya.

“ Kandidasi Calon Walikota Malang 2018 “

Dalam tahapan ritualisasi politik yang dilakukan di beberapa Situs yang ada di Kabupaten Malang, terdapat hal yang menarik yang penulis temukan. Dikatakan bahwa pintu masuk untuk melakukan perjalanan spiritual melalui Nglawang dibuktikan dari catatan etnografer penulis dari

penuturan Juru Kunci Sumber Polaman, Mbah Adjiz bahwa:

“...pintu masuknya ritual ini sebenarnya melalui Lawang atau Ngelawang yang ada di dalam serat Negarakertagama, kemudian dijelaskan juga kalo sumber Polaman ini juga ada bahkan sebelum kerajaan Singhasari, barulah saat ijin melalui pintu masuknya yang di sumber polaman ini. Situs polaman ini memang jarang yang tahu tapi untuk beberapa orang penghayat sudah banyak dijadikan rujukan sembahyang...”

Selain itu juga dijelaskan bagaimana mantra atau pengucapan doa yang biasanya sering dilakukan oleh salah satu elit politik,

“Pangeran ingkang Moho suci jumeneng ing ndhalem ingsun Gusti ingkang moho suci , Jumeneg ing ndhalem sak kabehane mahluk nyebar ing sak kabehane alam , jagat alit ngantos jagat ageng. Meniko wonten sifat sucinipun gusti, nanging mboten sedoyo manungso saget sumerep, naliko sumerep , manungso mboten saget ngucap punopo punopo mung meneng lan gumun. Pramilo

ingsun ngaturake asmonipun gusti ingkang moho suci."

Makna pengertian doa diatas dapat diartikan, Tuhan yang Maha Suci yang ada di dalam diri sebuah kesucian, yang ada di dalam seluruh makhluk di dalam dunia ini, mikrokosmos dan makrokosmos. Ada di dalamnya sifat suci Tuhan, namun tidak semua manusia itu mengetahuinya, ketika manusia itu mengetahui, manusia tidak bisa berucap apa-apa melainkan hanya diam dan berfikir. Oleh karenanya diri saya berucap bahwa tidak ada kekuatan yang berasal dari Tuhan yang maha suci.

Pemaknaan yang terjadi dalam sebuah ritual politik ini tak ada ubahnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat jawa ketika masuk di dalam sebuah tempat yang dianggap suci seperti Situs peninggalan kerajaan Singhasari ini. Didalam kehidupan manusia, setiap orang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya yang terbagi menjadi dua kebutuhan

material (jasmani) dan spiritual (rohani). Kebutuhan material adalah kebutuhan manusia pada *sandang, pangan dan papan*.

Ketika kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Akan tetapi usaha itu tidak selalu lancar karena keterbatasan pada kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, harus diimbangi dengan melakukan sesuatu yang bersifat spiritual.

Melalui perilaku, tingkah laku spiritual ini manusia berusaha memenuhi pada kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani atau kebutuhan spiritual ini adalah kebutuhan non materi. Dengan terpenuhi kebutuhan spiritual ini, maka, manusia ingin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tercapailah tujuan tertentu yang dikehendakinya dengan memperdalam keimanan dan ketaqwaan.

Berkenaan dengan hal itu, Mbah Adjiz menjelaskan sebagai berikut:

“ perilaku lampah spiritual yang dilakukan oleh orang politik yang datang mengharuskan mereka untuk mandi disini dan minum air yang disucikan, dari penuturan banyak orang yang sudah datang air di polaman ini punya tuah ghaib, ada yang bilang bisa mendatangkan rejeki, jodoh bahkan kesembuhan dari sebuah penyakit”

Adakalanya melalui perilaku spiritual manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan materi. Perilaku spiritual dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini dilakukan manusia dengan sikap *manembah* kepada Tuhan Maha Esa (Tashadi, 1994;1).

Oleh karena itu dalam sikap *manembah* manusia memasrakan diri kepada Ilahi. Secara konseptual *manembah* sebagai sikap pasrah kepada kekuatan *Ilahi* merupakan wujud dari emosi keagamaan (*Religious Emotion*). Emosi

keagamaan itu adalah suatu getaran jiwa yang menghinggapinya manusia dalam kehidupannya, meskipun getaran itu hanya berlangsung beberapa saja.

Kebutuhan spiritual inilah yang menyebabkan segala kelakuan manusia menjadi serba religi, sehingga menyebabkan serba keramat, baik pada kelakuan manusia itu sendiri, maupun tempat dimana kelakuan manusia itu dilakukan untuk dilaksanakan. Ada anggapan bahwa tempat keramat merupakan tempat bersemayamnya arwah leluhur dan adanya kekuatan gaib yang ada pada benda tertentu yang kebetulan tersimpan ditempat keramat tersebut.

Pengertian kekuatan gaib ini adalah segala kekuatan yang tidak kelihatan seperti rahasia alam, kekuatan yang aneh-aneh dan sebagainya (Poerwadarminta, 1976:288). Banyak petilasan yang dianggap gaib, keramat, membawa berkah dan selalu

ramai dikunjungi peziarah. Bagi masyarakat Jawa tradisi ziarah kubur sudah dikenal dan berkembang sejak zaman animisme dan dinamisme. Mereka berkeyakinan bahwa roh nenek moyang yang sudah meninggal dapat diminta pertolongan dengan cara datang ke kuburnya untuk berziarah dengan membawa peralatan upacara ziarah seperti bunga, dupa, mengucapkan mantra dan doa serta permintaan agar diberi kepercayaan yang hidup diantara masyarakat.

Budaya lokal yang ada menghadapkan para elit untuk dapat melakukan tuntutan spiritual dalam upaya mendapatkan yang di inginkan. Proses interaksi yang terjadi dalam tahapan metafisis ini dianggap sebagai jalan awal ketika elit melakukan sebuah prakter ritualisasi politik. Ibaratnya orang masuk kerumah orang lain pasti melalui sebuah pintu dengan meminta ijin ke yang punya. Begitulah yang terjadi di Kabupaten Malang ini. Pintu masuknya

melalui Lawang letaknya di sumber Polaman. Secara tidak langsung elit politik harus melakukan ritual awal di sana. Dengan panduan secara spiritual baik pribadi dan bantuan juru kunci. Elit politik di arahkan untuk mengikuti segala arahan yang sudah dijadikan patokan oleh pendahulu disana.

Pemahaman spiritualitas seorang elit dimungkinkan dirinya meyakini bahwa setiap manusia mempunyai saudara-saudara halus yang mendampinginya. Mereka tidak kelihatan oleh mata biasa. Mereka tergolong sebagai roh-roh halus. Saudara-saudara halus ini banyak yang menyebutnya dengan istilah *Saudara Kembar*, atau disebut juga *Sedulur Papat*. Konsep tersebut secara umum dipercaya dan dihayati oleh masyarakat Jawa. Dalam kehidupan sehari-harinya orang-orang Jawa terbiasa melakukan suatu laku prihatin dan tirakat tertentu untuk menjaga kedekatan mereka dengan roh Sedulur Papat itu.

Roh Sedulur Papat mempunyai sebutan Kakang Kawah (paling tua), Adi Ari-ari (paling muda), Getih (darah), dan Puser, sedangkan kita sendiri disebut Pancer. Kita adalah Pancer (pusat), sedangkan sukma kita yang lain disebut sedulur pendamping kita. Artinya, para sedulur kita itu keberadaannya mengikuti kita sebagai Pancer. Para sedulur ini secara *halus*, sosok dan wajahnya mirip dengan masing-masing orang yang bersangkutan. Roh Pancer dan para Sedulur Papat dalam satu kesatuan merupakan roh / sukma seseorang. Roh Pancer hadir secara biologis manusia. Berpikir dan berperasaan, berlogika, merencanakan kehidupan, merasa lapar, merasa sakit, ingin kaya, ingin hidup mulia, dsb, semuanya adalah aktivitas biologis manusia.

Dalam hal ini Roh Pancer manusia hadir dan bertindak sebagai makhluk biologis. Roh Pancer hadir di dalam kesadaran, hati dan pikiran, sehingga

yang berperan dalam keseharian manusia adalah Roh Pancer, sedangkan Roh Sedulur Papat keberadaannya bersifat mendampingi dan membantu membentuk kebijaksanaan dan memberikan peringatan-peringatan (dalam bentuk ide dan ilham, bisikan hati / nurani dan mimpi).

Roh Pancer hadir di dalam kesadaran dan berpikir manusia, tetapi roh sedulur papat tidak menentukan jalan berpikir manusia. Roh sedulur papat tidak menyatu dengan pikiran manusia, tetapi hanya bersifat membantu membentuk kebijaksanaan dan memberikan peringatan-peringatan, dalam bentuk rasa dan firasat, gambaran-gambaran gaib, ide-ide dan ilham, yang mengalir di dalam pikiran manusia.

Seseorang yang dalam hidupnya dominan mengutamakan sikap berpikirnya atau sok berlogika, menonjolkan kepandaiannya, mengutamakan pendapat sendiri dan ke-Aku-an atau dogma /

doktrin, atau tidak peduli situasi, dan mengesampingkan bisikan hati dan kebijaksanaan, maka dia lebih mengutamakan aspek biologisnya, aspek manusia keduniawiannya, sehingga tidak peka terhadap sesuatu yang bersifat roh, rasa dan firasat. Tetapi seseorang yang selalu peka batin, memperhatikan rasa dan firasat, dia menjadi tajam nalurinya, dan mungkin juga mengerti tentang kegaiban alam, karena dia kental berhubungan dengan rohnya.

Makna yang dipahami seorang elit dijelaskan lagi oleh GY bahwa :

“membuka sedulur papat lima pancer tandanya mengaktifkan kekuatan manusia diluar logikanya sebenarnya tapi dalam politik kita tidak tau apa yang akan menyerang kita, secara logika mas, gak mungkin saya minta bantuan orang lain dalam berpikir tentang diri

sendiri yah pasti minta tolong dirinya sendiri dalam artinya *nyambat awake dewe* “

Ini langkah awal dari elit politik membuka pemahaman tentang cara berpikirnya melalui pemahaman tentang diri sendiri. Sejauh dengan kemampuan dirinya beradaptasi dengan lingkungan politisnya. Karena yang kuat yang dapat bertahan menahan segala serangan baik terlihat maupun tidak dari lawan politik.

Setelah proses *mbukak dalam* dengan pemahaman sedulur papat lima pancer, elit politik diharuskan untuk kungkum di sumber Polaman. Arti dari kungkum adalah membersihkan jiwa maupun raga dari hati dan nafsu dunia dan oleh sebab itu orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat kebatinan pada zaman ini sering menemui kegagalan yang di sebabkan oleh hati dan fikiran yang belum di bersihkan.

Air sebagai salah satu anasir yang membentuk kehidupan di jagad rata ini sudah lama dipercaya memiliki kekuatan-kekuatan tertentu dalam hal pengobatan. Misalnya, segelas air putih yang tengah di beri doa-doa diyakini bisa menyembuhkan penyakit akibat akibat ulah makhluk halus. Lebih dari itu, air juga dipercaya mampu memberikan ketenangan jiwa dengan petunjuk dan laku tertentu.

Tapa kungkum memang sudah jarang dikupas keberadaannya. Namun laku ini punya mustika yang sangat hebat. Seseorang akan mempunyai kekuatan yang luar biasa pada hawa sakti indra keenamnya. Laku ini merupakan syarat utama dalam mencapai ilmu kadigdayan khususnya bagi para elit yang akan ikut dalam kontestasi politik. Dengan melakukan kungkum ini manusia akan mendapatkan getaran gaib dari indra keenamnya. *Kungkum* ini segera membangkitkan inti tenaga gaib, yang terasa seperti hawa panas menjalari seujur tubuh. Dalam

khasanah kebudayaan Jawa, memang dunia spiritual menjadi bagian yang amat penting. Paham kanoragan, kadigdayaan dan ilmu jaya kawijayan sangkan paraning dumadi menjadi tradisi yang kuat untuk dipahami sekaligus dilakukan. Salah satunya adalah masalah tapa *kungkum*.

Menurut MK dijelaskan bahwa,

“ ...salah satu manfaat tapa *kungkum* adalah untuk membangkitkan kekebalan tubuh dan melindungi diri dari segala marabahaya. Karena itu tidak heran jika para pelaku seni beladiri bahkan politisipun sering menjadikan praktek *kungkum* bagian dari kebiasaan mereka. Jika dilihat dari sisi spiritual sendiri, tapa *kungkum* merupakan cara efektif untuk membangkitkan kekebalan tubuh terhadap serangan ghaib..”

Dalam pemahaman spiritual seorang elit politik, mereka berpikiran untuk mendapatkan kekuasaan mereka secara instan. Namun tindakan rasional mereka ditujukan sebagai hal yang

bermanfaat bagi dirinya sendiri. Manfaat air sumber sangat baik bilai ditinjau dari kesehatan karena kemurnian airnya bisa meresap ke dalam tubuh sehingga badan merasa jauh lebih baik. Terlepas dari ritual yang mereka gunakan sebagai tujuan politik. Setiap elit politik selalu mementingkan proses dalam menjalani ritual itu. Untuk mencapai tujuan politik perlu adanya sarana. Dalam ritual politik ini sarana yang digunakan untuk ritual mbukak dalam serta tapa kungkum di sumber Polaman adalah dengan sesajen bunga. Pada ritual di sumber Polaman ini jelaskan oleh MA tentang sesajen yang digunakan, dikatakan bahwa,

“sebenarnya ritual dalam berbagai acara sangat dibutuhkan, karena mengandung filosofi disamping sebagai pengharum dan wangi bunga menambah khusyuknya dalam memanjatkan doa kepada Sang maha pencipta berbagai macam keperluan menggunakan Sesaji bunga yang beragam pula sesuai dengan kebutuhan, jika tidak menggunakan secara tepat dapat berpengaruh lain atau tidak

sempurnanya ritual tersebut. Kalau di sumber Polaman ini sesaji bunga yang sering digunakan itu sesaji Kembang Telon, terdiri dari tiga kembang yaitu kanthil, melati dan kenanga. Tentu setiap bungan punya maknanya sendiri “

Sesaji bunga telon terdiri tiga macam bunga.

Bisa menggunakan kanthil, melati, kenanga. Bunga kanthil berarti pula, adanya tali rasa, atau *tansah kumanthil-kanthil*, yang bermakna pula kasih sayang yang mendalam tiada terputus. Yakni cirahan kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada kedua orang tuanya dan para leluhurnya. Bukankah hidup ini pada dasarnya untuk saling memberi dan menerima kasih sayang kepada dan dari seluruh makhluk. Jika semua umat manusia bisa melakukan hal demikian tanpa terkotak-kotak ragam “kulit” agama, niscaya bumi ini akan damai, tenteram, dan sejahtera lahir dan batinnya. Seperti yang dijelaskan secara makna dari bunga kanthil, dikatakan oleh elit politik SU bahwa,

“bunga kanthil itu kan artinya bisa kumanthil, setidaknya nanti pada saat saya turun ke masyarakat, yah bisa bisa kanthil untuk memilih saya pada saat saya maju dari dapil mereka..”

Sedangkan untuk melati dan kenanga dimaknai Melati dari *damel tentremi ati* dan Kenanga dari *angen angene ndang keno*. Telon berasal dari kata telu (tiga). Dengan harapan agar meraih tiga kesempurnaan dan kemuliaan hidup (tri tunggal jaya sempurna). *Sugih banda, sugih ngelmu, sugih kuasa*. Sesaji kembang atau bunga telon dalam ritual yang digunakan dimaknasi secara filosofis agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan “keharuman” dari para leluhur. Keharuman merupakan kiasan dari berkah-safa’at yang berlimpah dari para leluhur, dapat mengalir (*sumrambah*) kepada anak turunya.

Berdasarkan masing-masing aroma bunga, dapat menjadi ciri khas masing-masing leluhur. *Desa mawa cara, negara mawa tata*. Beda daerah, beda

masyarakatnya, beda leluhurnya, beda pula tradisi dan tata cara penghormatannya. Bahkan aroma khas bunga serta berbagai jenis dedaunan tertentu sering menjadi penanda bau khas salah satu leluhur kita. Bila bau harum bunga tiba-tiba hadir di sekitar anda, kemungkinan besar ada salah satu leluhur anda yang hadir di dekat anda berada.

Dalam pemahaman masyarakat jawa yang di dapatkan dari para juru kunci, setiap elit politik yang datang ke sumber atau patirtan, orang itu harus di ruwat sebagai jalan dirinya akan menempuh hidup baru dalam kontestasi politik, dijelaskan oleh (alm) Mbah Noer, bahwa :

“yang kesini ini banyak, mulai dari pejabat lokal hingga Politisi Nasional saja pernah kesini, pak Pejabat daerah juga pernah. Tapi mereka kebanyakan menyamar dan datang pada malam hari. Mereka datang tentu ingin melakukan ritual disini, yah seperti melakukan ruwatan sengkolo atau hanya sekedar minum air sumber. Ruwatan yang biar suci kaya anak bayi yang baru lahir,

seenggaknya mereka dapat aura ghaib dari para widodari yang ada di sini. Sumberawan dipercaya memiliki tuah ghaib dalam hal awet muda. Barangsiapa mandi dan melakukan ruwatan disini pasti nempel widodarinya kenededes. Dalam ruwatan sengkolo biasanya yang dipakai adalah kembang tujuh rupa, kembang setaman, kembang macan kerah, dan kembang telon selain itu ada sesajennya juga”

Menurut Summer-Effler (dalam Haryanto 2013: 15), ritual merupakan jantung dari semua dinamika sosial. Ritual meningkatkan emosi kelompok yang berhubungan dengan simbol, pembentukan basis kepercayaan, pemikiran moralitas dan budaya. Orang menggunakan kapasitas pemikiran, kepercayaan, dan strategi untuk meningkatkan emosi dan interaksi di masa depan. Beattie (dalam Haryanto, 2013:16), menyatakan bahwa banyak ritual dan upacara keagamaan menerjemahkan kekuatan alam yang tidak terkontrol ke dalam entitas simbolik, melalui

ritual kekuatan alam dapat dimanipulasi dan dihadapi.

Pada masyarakat tersebut tidak terdapat pengetahuan empirik yang secara tepat memungkinkan manusia dapat mengatasi keanehan-keanehan alam melalui praktik yang terbukti secara ilmiah, oleh karena itu mengatasinya kemudian secara simbolik dan ekspresif. Kondisi inilah yang terjadi pada masyarakat malang. Masyarakat tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan fenomena dan kondisi apa yang terjadi pada anak gembel secara ilmiah. Satu-satunya pengetahuan yang mereka terima berasal dari orang tua, kakek, dan sesepuh desa yang diceritakan secara turun temurun.

Perubahan pemaknaan, dan nilai elit politik dalam ruwatan sengkolo ini dapat dikatakan komodifikasi juga. Nilai guna elit yaitu “keharusan” yang dimilikinya dimaknai berbeda dengan adanya ruwatan yang melibatkan banyak elit politik. Banyak

elit politik sebagai aktor utama yang terkait dalam ritual ini memanfaatkan “keharusan” tersebut untuk berbagai kepentingan.

Sementara dalam pandangan interaksi simbolik adalah teori George Herbert Mead, yang pada dasarnya ia menyetujui keunggulan dunia sosial, dalam arti bahwa dunia sosial itulah muncul kesadaran, pikiran, dst. Unit paling mendasar dalam teori sosial Mead adalah tindakan seperti dalam melakukan tindakan *ruwatan* meliputi empat tahap yang berhubungan secara dialektis yakni: impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi (Ritzer dan Goodman, 2003:318).

Dalam melakukan ruwatan sengkala, elit politik harus melalui berbagai proses. Setiap proses yang dilakukan oleh para elit politik ini dipercaya memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Berdasarkan penjelasan oleh MN dikatakan,

“ mbukak aura dan wibawa sering dilakukan oleh banyak orang untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang ketika dihadapan orang lain. Aura serta wibawa akan terpancar apabila proses ritual yang dilakukan oleh individu tersebut sesuai dengan kepercayaannya. Kadang ada yang melakukan ritual ini buat penglarisan atau juga buat enteng jodoh.”

Berbeda yang dikatakan oleh calon legislatif dari Partai Demokrat, YN bahwa ,

“ saya pernah buka aura di sana , karena saya percaya kekuatan dari sebuah situs secara ghaib bisa meningkatkan kekuatan saya apabila berhadapan dengan lawan politik. Yang memiliki wajah paling bersinar dan wibawa yang kuat akan mendapatkan perhatian masyarakat. Masuk akal kan kalo bukan hanya saya saja yang melakukan ritual ini. “

Aura adalah bias cahaya yang di hasilkan dari medan magnet/ listrik dalam tubuh manusia. Bias cahaya yang di timbulkan berwarna – warni, warna dari aura melambangkan sifat dasar,situasi dan

kondisi. *Aura dasar* pada seseorang melambangkan sifat, atau karakter asli yang pastinya tidak bisa di rubah ataupun di ganti. Ini bisa di contohkan, seseorang yang memiliki emosional tinggi auranya berwarna merah api. Sedangkan *aura pelapis* adalah bias cahaya yang di hasilkan dari situasi atau kondisi sehari – hari dan terletak di atas aura dasar, yang menyelimuti karakter kita.

Membedah aura adalah menyusun ulang, bias cahaya pelapis dengan bias cahaya dasar menggunakan energi positif agar lebih sinkron. Aura tak lebihnya seperti pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita dan tindakan kita. Ada pikiran negatif – ada pikiran positif, ada aura negatif ada juga aura positif, lalu, dari mana aura negatif di peroleh. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa aura pelapis bisa berubah hanya dengan dipengaruhi aktivitas kita sehari – hari. Jika kesibukan kita setiap hari di tempat negatif dan sejenisnya, tentu aura kita

juga akan terpengaruh dengan lokasi tersebut, hal ini lebih disebabkan karena bersinggungan dengan orang yang beraura negatif. Menyusun ulang dan mensinkronkan aura adalah penting, sebab manfaat buka aura bisa membuat kita tampil percaya diri, lebih mempesona dan memiliki daya pikat maksimal.

Dalam hal politik kegiatan mbukak auran dan wibawa ini diharapkan oleh elit tersebut bukan hanya menambah daya pikat bagi konstituennya saja melainkan pada saat debat terbuka ketika saling berhadapan dengan lawan politiknya bisa terlihat aura siapa yang paling memikat masyarakat. Tentu bukan hanya dengan wajah melainkan dibarengi dengan penjelasan visi misi dari seorang elit politik.

Ruwatan, sebagai salah satu warisan upacara tradisional Jawa sampai sekarang masih terlestarikan. Terlestarikannya upacara ini oleh karena keberadaannya memang dianggap masih bermanfaat bagi pelestariannya. Lepas dari itu, menurut

beberapa ahli Ruwatan semula berkembang di dalam suatu cerita Jawa kuno yang pada pokoknya memuat masalah penyucian. Pada prosesi ruwatan terdapat proses potong rambut. Dijelaskan oleh dukun ruwat MN, bahwa

“ rambut dipotong tandanya *guwak sengkolo* atau membuang sial, orang yang diruwat harus dipotong rambutnya. Nanti rambutnya akan dilarung di laut supaya yang jelek ini hilang. Biasanya ruwatan dilakukan pas bulan *Sura* tapi ada juga yang menjalankannya saat momen tertentu seperti pas hari kelahiran atau juga bisa saat ingin maju menjadi pejabat “

Menurut Koentjaraningrat (1992:254) waktu upacara atau ritual biasanya dirasakan sebagai saat-saat yang penting dan gawat, penuh dengan daya gaib. Daya gaib yang berbahaya itu harus ditolak dan dijaga lewat pelaksanaan upacara atau ritual. Ritual ruwatan potong rambut dilaksanakan setiap tahun pada tanggal satu *Sura*. Pemilihan waktu ini

disesuaikan dengan keyakinan masyarakat bahwa tanggal satu Sura adalah tanggal keramat dalam penanggalan Jawa, yang tanggal tersebut dipercaya mempunyai daya magis yang sangat tinggi.

Mandi kembang yang identik dengan hal sakral dan berbau mistis, ternyata juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Eleman air dan bunga sebagai media utamanya, mampu memberikan kesegaran dan kasih sayang pada jiwa serta raga. Selain memberikan kesegaran, mandi bunga atau kembang dipercaya mampu menurunkan stres dan menstabilkan medan energi. Pemanfaatan energi bunga dalam ritual mandi juga memberikan perubahan yang lebih positif, dari sisi mental, emosional, maupun spiritual, cakra lebih aktif, aura pun lebih terang dan kuat.

Dikatakan oleh elit politik yang melakukan ruwatan HB, bahwa

“ mandi kembang itu hal yang sering dilakukan, supaya energi dari bunga bisa terpancar. Air sama bunga digabung jadi satu apalagi airnya air sumber. Meskipun saya jadi atau tidak tapi manfaatnya akan saya rasakan”

Guna meraih manfaat bunga dalam ritual mandi, biasanya dipilih jenis bunga yang memiliki aroma wangi dan menyegarkan. Manfaat mandi bunga dengan mudah dirasakan ketika seseorang dalam kondisi sedang diserang lawan politiknya. Karena itu, orang-orang tradisional mengobati orang yang jiwanya terganggu dengan cara dimandikan air bunga, bahkan termasuk orang yang telat menikah pun disarankan agar sering mandi bunga tujuh rupa.

Setelah itu biasanya untuk mendapatkan wangsit dalam sebuah kontestasi politik melalui adanya pulung, namun pulung tidak serta merta turun begitu saja. Mendapatkan pulung perlu adanya ritual Semedi di Candi Singosari.

Sangat menarik ketika simbol adanya *pulung* itu dijadikan elit politik gambaran ketika dia mendapatkan pulung yang sama dengan seorang raja, maka secara tidak langsung kepemimpinan itu akan dia dapatkan. Mitos adalah kepercayaan yang tidak didasarkan kepada pengetahuan ilmiah atau dasar agama, sehingga mitos dibangun dari cara pandangan yang irasional, bukan cara pandang berdasarkan fakta tetapi sebuah ilusi terhadap sekitarnya. Biasanya mitos dilahirkan secara turun temurun dalam tradisi lesan.

Dalam masalah politik cara pandang serba mitos seringkali hadir dan mempengaruhi cara pandang terhadap pemilihan pemimpin serta relasi penguasa dengan rakyat. Ada kepercayaan tentang “pulung” sebagai wahyu kepemimpinan, siapapun yang mendapatkannya akan mempunyai kemampuan lebih untuk memimpin, mempengaruhi orang lain, akan tubuh kewibaaan, semua itu karena

adanya pulung dalam tubuhnya. Saat pulung itu pergi, maka ia akah kehilangan semuanya, kewibawaan, daya pesona, kekuatan supranatural untuk memimpin dan mempengaruhi orang.

Motivasi orang yang datang ke situs untuk melakukan semedi selain mencari wahyu atau wangsit , mereka juga melakukan sebuah perjalanan spiritual untuk sebuah ketenangan. Praktik semedi yang melibatkan pengosongan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. meditasi adalah kegiatan mental terstruktur, dilakukan selama jangka waktu tertentu, untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menyikapi, menentukan tindakan atau penyelesaian masalah pribadi, hidup, dan perilaku. Semedi sering diartikan secara salah, dianggap sama dengan melamun sehingga meditasi dianggap hanya membuang waktu dan tidak ada

gunanya. Semedi justru merupakan suatu tindakan sadar karena orang yang melakukan meditasi tahu dan paham akan apa yang sedang dia lakukan.

Prosesi semedi tidak dilakukan dengan hanya berdiam diri, melainkan melalui perantara dupa dan bakar kemenyan. Seperti yang di jelaskan oleh SP bahwa,

“dupa dan menyan itu cuma perantara manusia dengan Tuhan, wahyu yang berasal dari Tuhan gak akan pernah mampir apabila kita tidak mempersembahkan wewangian yang merupakan simbol keindahan Tuhan. Ada yang menarik dari ritual bakar dupa, apabila asapnya lurus naik keatas tandanya kita akan mendapatkan wangsit”

Dijelaskan juga tentang doa saat membakar dupa,

“Niyat ingsun ngobong dupo, kukuse dumugi angkoso, kang anggondo arum pinongko tali rasaningsun manembah dumateng Gusti Kang Akaryo Jagad.”

(Artinya : Aku berniat membakar dupa, asapnya yang membubung ke angkasa, berasa harum sebagai tali yang mengikat rasaku

untuk menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta).

Kalimat pembuka tersebut diatas, biasanya diucapkan oleh praktisi Kejawen atau aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME, pada awal menyalakan dupa atau hio sebelum praktik ritual dimulai. Setelah itu, dupa yang menyala lalu digerakkan dengan cepat agar api yang menyala dipucuknya padam, tinggal nyala diujung dupa dan membiarkannya terus menyala dan mengeluarkan bau harum. Kemudian dupa tersebut, biasanya berjumlah ganji, bisa 3, 5 atau 9 sekaligus, ditancapkan ke media (bisa gelas atau tempat khusus) yang berisi beras atau pasir yang bersih. Dengan membakar dupa atau hio dan juga biasanya ditambah membakar kemenyan di tungku perapian, sebenarnya merupakan sebagai sebuah tindakan untuk menciptakan suasana yang hening dan sakral. Tentu saja juga untuk menciptakan ruangan atau tempat

yang harum. Dengan demikian proses berjalannya acara ritual dapat lebih terkonsentrasi, tidak terganggu oleh kebisingan dan bau yang tak sedap.

Penggunaan dupa dalam berbagai ritual agama-agama di dunia sudah tidak asing lagi. Tidak hanya agama-agama ibu seperti Hindu, Budha atau kepercayaan yang dianut orang-orang China, orang Kristen, Yahudi dan Islam pun menggunakannya dalam berbagai ritual keagamaan mereka. Hal tersebut dikarenakan para pemeluk agama dan kepercayaan tersebut percaya bahwa doa yang mereka panjatkan akan lebih cepat sampai, hal tersebut juga merupakan tanda kesakralan sebuah ritual keagamaan.

BAB VIII

RASIONALITAS ELIT, TRADISI DAN POLITISI PRAGMATIS

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yang berarti *pragma* merupakan perbuatan atau tindakan dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *pragmatic* yang merupakan berkenaan dengan hasil praktik. (Zaprul Khan, 2016) Pada terjemahan yang berasal dari *Encyclopedia of Knowledge* merupakan sebuah gerakan filosofis yang menyatakan makna dan kebenaran dari setiap gagasan adalah fungsi dari hasil praktisnya. (Aartolahti, 1997).

William James (1842-1910) merupakan tokoh yang memunculkan pemahaman pragmatism menjadi begitu dikenal hingga saat ini. Dalam bukunya yang berjudul *Pragmatism* (1907) dan *The Meaning of Truth* (1909), pemahaman menjadi *pragmatism* ini muncul seolah menguasai filsafat abad

keduapuluh. Meskipun pemikiran James tidak lepas dari Sander Pierce (1839-194), namun dirinya telah mengubah konsep pragmatisme menjadi benar-benar hidup dalam kepentingan praktis yang ada dalam kehidupan manusia.

Melihat bahwa pragmatism berada dalam ranah praktik kehidupan manusia. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan adanya etika yang berhubungan dengan perilaku manusia. Keduanya jelas menghasilkan pemahaman baru yang melihat tentang baik buruknya tindakan manusia dari segi manfaatnya. (Suseno, 1991) Sejatinya pragmatisme ini memiliki kesamaan dengan utilitarianisme yang sama-sama ingin mencapai kepuasan, manfaat dan kebahagiaan. Oleh karena itu pragmatisme memandang suatu hal baik dan bermoral merupakan suatu kehidupan yang dapat dirasakan dengan sangat memuaskan. (W.Burk, 1958). Pada kelahirannya, filsafat pragmatisme awal yang di

kemukakan oleh Pierce selalu identik dengan mencari kebenaran sekaligus mendatangkan kebenaran tersebut. Semua itu dikarenakan bangsa Amerika mengukur kedudukannya sebagai manusia dari banyaknya materi. (Mas'ud, 2015)

Jadi dapat dilihat bahwa yang terjadi pragmatism tidak hanya digunakan untuk mencari kebenaran melainkan juga ditentukan oleh etika dengan tetap memperhatikan kepuasan individu. Melihat apa yang dikemukakan oleh Pierce kemuda James, terlihat jelas bahwa prinsip mendasar pemahaman pragmatism ini berkaitan dengan materi yang di peroleh individu dalam keadaan puas diri tanpa memperhatikan etika serta moral yang dilakukan. Semua ini karena sifat yang dimiliki manusia, dimana manusia hidup identik dengan kepuasan.

Hilangnya Identitas Politisi

Dalam pendekatan yang lebih menyeluruh, para elit menegaskan bahwa kekuatan ideologis mereka menjadi alat utama kekuasaan. Ini di dasarkan pada pilihan partai politik yang mereka jadikan kendaraan. Perilaku para elit menjadi sorotan tajam media. (Kompas, 2017) Melihat perilaku setiap elit, setidaknya tercermin pada budaya politik yang elit gunakan. Mengingat bahwa pendekatan ini merupakan unit analisa yang paling dekat dengan elit.

Terbukti ada satu kegaduhan yang membuat para elit penguasa saling memberikan komentar atas perilaku elit dibawahnya. Yang paling di ingat adalah kasus yang menimpa Ratna Sarumpaet. Ketika satu bukti foto serta pernyataan individu dijadikan alat utama untuk menegaskan tindakan yang terjadi kepada individu tersebut. Selanjutnya semakin banyak elit penguasa yang bersimpati dan

berkomentar, selain para elit juga mengutuk keras tindakan itu. Disinilah masyarakat merasakan dampak yang besar, ketika figur yang mereka jadikan pedoman menjadi pesakitan. (Gutari, 2017) Fenomena ini melihat bahwa kedekatan elit dengan para penguasa diluar kekuasaan. Membentuk relasi yang menarik bahwa tradisi elit dalam meraih popularitas identik dengan membentuk serta membangun berita bohong.

Identitas elit politik yang berubah-ubah membuat masyarakat semakin hilang kepercayaan. Terbukti ada beberapa figur anggota partai yang gagal menjadi anggota legislatif. Meskipun elit tersebut selalu berkomentar dan menjadi tameng atas pesakitan para elit pusat. (CNNIndonesia, 2019) Dalam keilmuan yang seperti ini, tradisi politik para elit berkembang menjadi strategi politiknya. Adapun ideologi yang merupakan seperangkat keyakinan yang dipengaruhi oleh budaya politik dan kemudian

kerap memberikan pengaruh terhadap tuntunan elit dalam bertindak dan berperilaku. Terkait dengan perilaku elit yang seperti ini, tradisi politik pada akhirnya terkait dengan norma dan nilai-nilai sikap yang dijadikan pegangan aktivitas berpolitik oleh para elit. (Yunus, n.d.)

Dalam konteks politik kekinian, semakin elit politik dekat dengan kekuasaan di pusat, semakin jauh dirinya dengan masalah. Pandangan ini dikarenakan kedekatan sosial masih menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sebuah kasus. Pada masa sekarang politik dilihat sebagai sebuah produk untuk mendapatkan kekuasaan.

Saat ini partai politik sering menggunakan keilmuannya hanya untuk menjatuhkan lawan. Inilah fase dimana politik sering dijadikan lelucon oleh banyak pihak. Seperti politik “ *poli artinya banyak, tik artinya taktik* ” banyak taktik yang harus dilakukan dan diciptakan hanya untuk meraup hasil sebesar-

besarnya, menegaskan kekuasaan yang sekuat-kuatnya, dan memperoleh kewenangan yang mutlak. Perilaku inilah yang sering dirasakan oleh masyarakat pada masa pemilihan umum.

Setiap elit politik yang berkontestasi sejatinya harus memiliki strategi yang tepat untuk mendapatkan kekuasaan. Berpindahnya elit dari satu partai ke partai yang lain atau dari satu kubu kekubu yang lain, menunjukkan bahwa elit tersebut sedang mencari kendaraan yang sesuai untuk agenda politiknya. (Beritagar, 2019)

Berpindah partai memang lazim dilakukan oleh para elit, sudah ada banyak contohnya, apalagi elit tersebut merupakan produk orde baru hingga era reformasi kini. Bahkan masyarakat melihatnya sebagai kekuasaan yang langgeng. Tetap berada dalam pusaran kekuasaan pusat meskipun rezim telah berganti-ganti. Hal inilah yang disebut sebagai politik kepentingan. Hijrahnya para elit politik untuk

sebuah kepentingan inilah yang membuat masyarakat semakin mengerti tentang perilaku dan identitas elit tersebut. Sebagian masyarakat melihat politik sebagai alat untuk meraih banyak kepentingan yang di dasarkan pada prioritas pribadinya.

Seperti halnya dalam pemilu legislatif 2019 yang lalu, konteks kampanye yang dilakukan oleh para elit yang merupakan calon legislatif hanya sebatas formalitas dan pragmatis. Simbol-simbol kepartaian digunakan sebagai alat pertukaran sosial dengan para konstituen. Dengan mekanisme proporsional terbuka yang mengharuskan elit untuk bisa bergerak langsung kepada masyarakat pemilihnya, nyatanya masih banyak yang hanya mengandalkan figur terkenal sebagai sokongan.

Selain itu masih adanya praktek-praktek memberikan barang dan uang sebagai bentuk imbal balik ketika mereka mau memilih nantinya. (VOAIndonesia, 2019) Dari hasil penelitian yang ada,

menunjukkan bahwa insiden politik uang terjadi secara masif dalam Pemilu 2019. Dilihat dari berbagai macam metode pengukuran, politik uang berkisar antara 19,4% hingga 33,1% tergantung pertanyaan dan jumlah skalanya. Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita mencapai sekitar 192 juta orang. Kisaran antara 19% dan 33,1% berarti diperkirakan antara 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktik haram politik uang. (Muhtadi, 2019)

Dari fenomena ini menunjukkan bahwa hijrahnya elit politik dengan menggunakan mesin partai yang baru tidak serta merta memuluskan kepentingannya. Tradisi loncat partai seakan menjadi strategi yang kuat untuk mendapatkan suara. Meskipun masih harus melalui proses sosialisasi, komunikasi dan tawar menawar. Semua ini dilakukan karena para elit masih harus mendapatkan kepercayaan publik. Namun hal yang harus menjadi ungkapan kebenaran, bahwa masyarakat melihat

platform ideologi partai masih berpengaruh kuat terhadap rasionalitas pilihan masyarakat. Atau dalam bahasa millenials, *"bukan kaleng-kaleng"*.

Perilaku Politisi yang Berpindah-pindah

Iklim politik Indonesia memang begitu dinamis. Para elit dapat bergerak sesuai dengan kehendak politik mereka. Perilaku berpindah-pindah pun telah menjadi agenda tahunan, bahkan setiap periode pemilu ada elit yang maju dengan latar belakang partai yang berbeda. Wajar dalam celotehan masyarakat jawa bahwa *"isuk kedele, sore tempe"*. Ini menunjukkan betapa cepat berubahnya omongan serta tindakan para politisi.

Dalam kontestasi politik nasional, kita melihat fenomena berpindahnya elit politik sebagai kutu loncat, dengan gambaran bahwa perilaku politik para elit di dasarkan pada kekuasaan, bukan pada menciptakan perubahan yang baik di masyarakat.

Pada pemahaman yang sama, sebagian masyarakat menganggapnya sedang berhijrah, meskipun hijrah merupakan hal yang mencari kebaikan dari akibat buruk yang sudah pernah diperbuat. Namun hijrahnya elit politik lebih di dasarkan pada kebaikan individu untuk menegaskan kekuasaannya dalam politik.

Biasanya para elit memiliki afiliasi dengan tokoh partai politik yang telah dianggap memiliki *bargaining position* dengan penguasa. Dari sini strategi utama yang dilakukan dengan ikut tergabung dalam tim suksesnya. Melihat pada pemilu sebelumnya (2014-2019) alasan yang mendasar elit politik berpindah terletak pada populisme yang memiliki akar sejarah pada kontestasi politik nasional. Era itu dimulai awal kemerdekaan dan mulailah muncul populisme nasionalis-kerakyatan dengan rezim otoriter pada Demokrasi Terpimpin. (Hadiz & Robison, 2017)

Perilaku itu dilakukan dalam rangka menciptakan *image* di masyarakat bahwa elit tersebut dekat dengan penguasa. Tindakan yang dilakukan oleh elit semakin menegaskan *pragmatism* di era pasca kebenaran tindakan yang dilakukan memang menjadi kebenaran tersendiri bagi masyarakat. Menciptakan *branding* populis namun dengan kinerja yang belum tentu teruji. Bahkan elit sengaja melakukan tindakan yang membuat masyarakat terpecah belah dan percaya terhadap tindakan yang dilakukan oleh para elit politik.

Ketika memahami konsep pasca kebenaran tentu sangat terasa di Indonesia, ini bermula dari pernyataan Jokowi tentang suasana politik yang dijejali dengan berbagai kabar bohong secara berulang kali, sehingga post-truth benar-benar terjadi. (Tempo, 2019) Kondisi tersebut berkaitan dengan keadaan fakta objektif yang kurang berpengaruh dalam membentuk opini di masyarakat dari pada

menarik emosi dan kepercayaan. Kekuasaan lain dalam gerakan politik dan tokoh populis otoriter itulah yang dengan sengaja membuat fakta alternatif sebagai entitas tandingan. (Harsin, 2015)

Berpindahnya elit politik tentu saja berkaitan dengan kepentingan. Dimana politik identik dengan kekuasaan, kewenangan dan legitimasi. Ketiga pemahaman ini menciptakan sebuah pola yang terus menjadi panduan elit politik dalam berkontestasi. Dalam pandangan Gudio Dorso, seorang theorist asal Italia, menyebutkan bahwa dalam suatu struktur masyarakat terdapat satu dikotomi, yaitu dua kelompok yang memainkan peran sebagai kelas yang memerintah dan yang berperan sebagai kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah ini jelas memiliki power dan kuasa atas kelas yang diperintah. (Hagopian, 1978) Pandangan ini sejalan dengan realita politik yang ada di Indonesia, bahwa adanya strata politik menyebabkan para elit yang tidak

sejalan berupaya untuk mengamankan diri dengan mencari pengakuan di partai lain.

Berbeda dengan pandangan Robert Putnam, ada beberapa identifikasi yang dilakukan untuk melihat berpindahnya elit politik yakni dilihat dari posisinya, reputasi kinerjanya, dan kebijakan yang dibuat. Sejatinya posisi dan reputasi menunjukkan seberapa besar pengaruh elit dalam membuat kebijakan yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam penjelasannya Putnam juga menggambarannya dalam piramida kekuasaan. Semakin tinggi ke atas, semakin besar kekuasaan dan pengaruhnya bagi elemen bawahnya. Stratifikasi politik inilah yang juga menyebabkan sirkulasi kepentingan serta tumpang tindih kekuasaan. (Farisi, 2017) Apabila elit politik yang tidak mendapatkan posisi dan juga kewenangan dalam kebijakan, selamanya elit tersebut akan menjadi politisi lapis

kedua. Oleh karena itu dalam strateginya elit harus berpindah.

Tindakan elit dalam menegaskan kekuasaannya tidak serta merta harus mendapat arahan koleganya. Yang harus dipahami elit adalah kendaraan yang akan mengantarkan dirinya untuk bisa mengikuti kontestasi politik. Sebagian besar mereka berpandangan bahwa masyarakat hanya dijadikan objek dalam politik. Hanya sebatas dibutuhkan pada saat proses pemilihan berlangsung. Satu suara menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan. Namun satu suara sebagai bukti legitimasi elit terhadap kebijakan yang masyarakat rasakan nanti. Rasionalitas elit menjadi agenda yang sering diperdebatkan. Kadangkala elit harus mengaburkan ideologisnya sebagai bentuk kekuasaan yang akan mereka raih. Selain itu mereka juga harus membuang jauh perasaan sakit hati apabila pililhan politik yang

mereka ambil justru akan membawa dampak buruk bagi keputusan politiknya.

Setiap kontestasi yang berafiliasi kekuasaan merupakan wujud dari legitimasi masyarakat akan pilihan terhadap elit. Sejatinya elit hanya membutuhkan dukungan dalam mekanisme pemilihan. Kekuasaan yang di dapatkan oleh elit tidak selamanya di identikan dengan kewenangan. Karena kewenangan harus di dasari legitimasi kekuasaan yang sah sesuai dengan aturan hukum. Laswell berpendapat, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk peraturan-peraturannya. (Laswell, 1936) Oleh karena itu, masyarakat yang menjadi objek peraturanyang dibuat harus mengikuti dan menjadikannya kepatuhan. Posisi elit juga harus mendapatkan perhatian. Ada di bagian manakah elit tersebut berasal. Karena semakin tinggi posisi elit semakin besar pengaruh atas peraturan yang di buat

Dinamika politik Indonesia kini tidak lepas dari kekuasaan elit yang dengan sengaja menciptakan pembenaran secara sepihak atas kewenangan yang dilakukan. Para elit politik dalam meraup kekuasaan selalu membuat serta menciptakan gerakan-gerakan baru dan informasi-informasi yang belum benar kejelasannya. Pada era pasca kebenaran, kebohongan dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi. Pilihan rasional elit dalam menciptakan sebuah isu tidak disertai dengan data dan fakta yang benar. Untuk menangkal itu semua ada strategi yang harus dilakukan oleh para elit. Yaitu dengan menciptakan counter strategi melalui pendekatan politisi, publik dan media. Ketiganya merupakan alat utama sistem informasi yang berperan menangkal adanya berita bohong. (Golose, 2019)

Melihat tiga pendekatan yang telah dikemukakan, politisi merupakan awal mulanya ide gagasan tentang sebuah konten politik berasal. Pada

saat konten tersebut mulai muncul di dalam ruang publik. Adanya media yang mengabarkan, dimana fungsi media sebagai alat transfer informasi. Secara tidak langsung ketiganya berperan untuk dapat meredam adanya kebohongan publik serta kegaduhan politik. Pada era pasca kebenaran, kebohongan yang diciptakan oleh para elit politik sering menjadi fakta alternatif bagi sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa fakta yang dimunculkan adalah sebuah kebenaran. Fenomena ini kita jumpai dalam tradisi politik masa kini. Adanya lembaga survey yang melakukan *tracking* hasil pemilu dengan menciptakan perang angka melalui *quick count* membuat masyarakat merasakan benar dampak informasi yang sebenarnya harus melalui sistem terlebih dahulu untuk menegaskan kemenangan salah satu pihak.

Namun dengan adanya kewenangan media sebagai bagian dari kekuasaan modern, menunjukkan

bahwa pendelegasian informasi harus berulang-ulang dan berkali-kali. (Kompasiana, 2019) Semua ini dilakukan atas dasar adanya pemberitaan tandingan yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Dengan demikian apabila kekuasaan merujuk pada kewenangan suatu kelompok dalam distribusi informasi, akan ada banyak distribusi informasi yang muncul ketika semua elit saling memberikan komentarnya pada media.

Tumpang tindihnya kebenaran informasi yang ada, menjadi bahan ejekan masyarakat awam. Terlepas dari elit yang berkontestasi, perilaku elit yang berada dibalik kekuatan politik ini justru yang menimbulkan kegaduhan. Seringnya elit politik berpindah haluan, menyebabkan masyarakat juga bingung untuk menentukan pandangannya. Semua itu karena figur yang diharapkan mampu memberikan pencerahan, justru membuat kegaduhan politik.

Secara rasional, masyarakat menerima informasi tersebut, namun secara kebenaran masih bertanya-tanya apakah benar demikian. Semakin berkuasanya elit, semakin kuat pula relasi dan penguatan media yang di dapatkan. Inilah yang membuat sebagian elit yang bertentangan mau ikut masuk ke dalam kelompok yang sama. Semua ini karena elit ingin mengamankan diri terlepas dari permasalahan politik yang diakibatkan menentang kekuasaan.

Tradisi Politisi Kekinian : *Hijrah*

Adanya tradisi elit berpindah-pindah ini menciptakan polarisasi baru dalam pemetaan politik Indonesia. Bukan saja berpindah platform partai, para elit juga berpindah ideologi serta kepentingan untuk mengamankan posisi kekuasaan. Dalam era pasca kebenaran seperti saat ini, kecenderungan elit jauh lebih pragmatis dalam melakukan gerakan

politiknya. Pragmatisme politik dapat diartikan sebagai tindakan yang yang memperjuangkan atau mengamankan kepentingan elit untuk melihat serta memprediksi kekuasaan di masa mendatang.

Politik era pasca kebenaran tak ubahnya politik pragmatis, ketika ada kekuasaan yang memberikan keuntungan, maka di situlah para elit pragmatis berkumpul. Kepentingan politik dapat dilihat elit sebagai suatu bentuk kebutuhan pada kekuasaan. Karena dengan kepentingan yang elit buat dapat menciptakan relasi kekuasaan antar sesama elit. Para elit era pasca kebenaran di identikan dengan *framing* opini yang begitu besar dampaknya terhadap *background* ideologi yang melekat. Setidaknya ini tercermin dalam beberapa tokoh yang saat ini berada di dalam lingkaran kekuasaan. Salah satu dampak yang terjadi adanya disinformasi yang banyak mendominasi media. Dimana media melakukan *framing* terhadap pemberitaan tertentu. Kemudian

dibenturkan dengan elit politik yang bertentangan, di sisi lain ada kelompok elit yang memanfaatkan situasi untuk sebuah politisasi agama. Semua tindakan yang dilakukan sejatinya hanya menunjukkan fakta yang parsial. Tindakan para elit tersebut tentu berada dalam ruang publik. (Jinan, n.d.)

Elit politik dalam kontestasinya tidak lepas dari adanya simbol-simbol agama yang dijadikan alat pertukaran media sosial. Mengedepankan popularitas figur unggulan, menciptakan ruang dialog khusus, serta melakukan eksplorasi simbol-simbol untuk kepentingannya. Era pasca kebenaran yang melanda negara Indonesia tentu menimbulkan dampak. Selain adanya disinformasi, problematika ini memunculkan penggunaan media sosial yang begitu pesat yang menciptakan paradigma baru dalam perkembangan tradisi di masyarakat. Informasi yang merupakan *transfer authority* dari pusat ke daerah, kini hanya sebatas *power off distribution*.

Transfer authority dimaknai sebagai pemberian wewenang yang dilakukan dalam rangka menciptakan transparansi informasi dari pusat ke daerah secara terstruktur. Namun dengan adanya tradisi baru ini, informasi hanya sebatas pendistribusian kekuasaan, dari pusat informasi ke juru bicara dan jubah mengkoordinasikan dengan media-media yang ada. Model inilah yang di pandang sebagai manipulasi paradigma masyarakat melalui fakta-fakta alternatif. Yang terjadi saat ini adalah banyak munculnya berita-berita bohong, tindakan ekstremisme dan retorika palsu.

Bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh elit nampak dengan keputusan politik yang dibuat saat elit berpindah partai. Dimana itu dimaknai sebagai hijrah. Hijrah menurut agama Islam dalam pengertiannya, secara etimologi berasal dari bahasa arab "*isim masdar*" dari kata *hajara-yahjuru-hajran* yang artinya meninggalkan, memutuskan. (Munawwir,

1997) Menurut pendapat ar-Rāghib al-Asfahānī ,al-Hijru atau al-Hijran yang artinya seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik perkataan, bahkan hati. (Ar-Raghib, 2008)

Dalam pemahaman awam, berpindahnya elit politik dalam upaya perpindahan platform serta ideologi individu dan menekankan bahwa sebenarnya elit telah melakukan hijrah. Meskipun apabila dikembalikan pada maknanya, hijrah merupakan suatu proses perpindahan kearah yang lebih baik. Sebagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Kota Mekkah yang masih jahiliyah menuju ke Madinah yang sudah menerapkan Islam.

Sedangkan menurut HR Bukhari & Muslim menyebutkan, *“Dari Sahabat Umar bin Khaththab ra berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, ‘Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang*

dia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya sesuai ke mana dia hijrah.'"

Pada hadist di atas dijelaskan bahwa berpindahnya manusia untuk menjadi lebih baik harus di dasari dengan niat untuk kepentingan yang dirinya ucapkan. Hadist tersebut dapat kita lihat bahwa ketika elit berpindah, maka berpindahnya dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Tidak diperkenankan untuk kembali ke masa dimana elit telah melakukan kesalahan. Setidaknya pilihan politiklah yang dapat merubah perilaku elit untuk berpindah, mengamankan posisi untuk kepentingan individu.

Hijrah politik memang menjadi tradisi bagi politisi pragmatis. Selain hijrahnya untuk kebaikan posisinya, elit berpindah juga harus handal dalam

melakukan lobi-lobi politik. Pada pemilu 2019 lalu, kita melihat bahwa partai Hanura yang mendukung koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, tidak dapat masuk ke dalam parlemen dikarenakan perolehan suaranya kurang dari ambang batas yang ditentukan sebesar 4 %. (Kompas, 2019) Dalam etika politik yang ada, harusnya Wiranto tidak mendapatkan jatah ada di dalam kekuasaan pusat. Namun yang terjadi pada saat ini dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. (Detik, 2019)

Selain itu yang nampak sekali adalah bergabungnya Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjadi menteri Pertahanan di kabinet Jokowi periode kedua. Ditambah lagi dengan jatah menteri kelautan dan perikanan yang diberikan kepada Edhie Prabowo. (Liputan6, 2019) Melihat kenyataan yang demikian, masyarakat melihat bahwa berpindahnya arah koalisi non pemerintahan untuk bergabung mendukung pemerintah rupanya

menciptakan polarisasi baru. Tidak selamanya oposisi terus berada dalam luar pemerintah, justru saat ini berada di dalam pemerintah atau dengan kata lain bergabung dengan koalisi.

Hijrahnya oposisi menuju koalisi menekankan bahwa ideologi politik dapat dikaburkan ketika kepentingan politik yang menjadi tolok ukur utama. Pragmatisme politik yang dibangun oleh salah satu kubu menegaskan pembangunan bangsa dan negara lebih diutamakan daripada konflik kepentingan yang mendominasi dengan pembenaran-pembenaran alternatif yang muncul dikarenakan fanatisme pendukung terlalu mempertontonkan simpati publik tentang siapa yang tersakiti dan menyakiti.

Dalam penggalan kalimat yang diungkapkan oleh Kanselir German, Otto von Bismarck "*Politics is the art of possible*", dikatakan bahwa politik adalah seni untuk memperhitungkan semua kemungkinan. Ungkapan ini seakan dapat menggambarkan perilaku

elit saat ini Banyaknya elit yang berpindah-pindah dari partai, dukungan, dan platform ideologi. Kegiatan politik adalah mekanisme hitung-hitungan untung rugi, tentang sebuah kalkulasi kepentingan. Berupaya untuk bagaimana mengupayakan kepentingannya supaya dapat terwujud. (Aslan & Tasdemir, 2009)

Hijrahnya elit politik harusnya membutuhkan pola matematika. Namun, pola matematika politik bukan perhitungan yang mutlak, kadang bahkan politisi tidak pernah berhitung untuk berpindah baju partai. Dalam sirkulasi elit yang saling berpindah, mobilisasi massa yang berganti kepentingan dengan kebutuhan partai politik juga tidak dapat dikesampingkan. Sehubungan dengan fenomena itu, Pareto menjelaskan bahwa setiap masyarakat manapun, elit secara berkesinambungan melakukan upaya perubahan didalam kelas-kelas dan posisi, dimana dirinya berada. (Hagopian, 1978) Dari

pendapat ini dapat dijelaskan bahwa sebenarnya elit yang berhijrah, juga membentuk pertukaran sosial dikalangan kelas-kelas lainnya.

Berbeda dengan konsep politik hijrah Kartosuwiryo, disaat tahun 1939 krisis politik di tubuh PSII makin memuncak, pemikiran ini ditolak oleh dewan partai. Dikarenakan kebijakan politik hijrah yang membuat ruang konflik. Dimana melibatkan dua tokoh utama partai, Abikusno dan Kartosuwiryo. Pada waktunya konflik itu menyebabkan hubungan keduanya retak. Di dalam agenda utamanya Kartosuwiryo konsekuen melaksanakan putusan Kongres PSII 1938, dimana keputusan hijrah telah disepakati. Namun disisi lain membuat Abikusno berbalik ke dalam garis parlementer dan bergabung dalam federasi politik nasional. Pemikiran Kartosuwiryo dapat dikatakan menjadi dasar perjuangan terhadap keimanan Islam. Keimanan dalam agama Islam perlu diwujudkan

dalam tatanan perilaku untuk dapat beribadah kepada ALLAH SWT. Dimana pada masa itu negara tidak menjamin tatanan yang Islami. (Suryana, 2019)

Aktualisasi pemikiran politik hijrah Kartosuwiryo di wujudkan dalam persiapan sumber daya manusia yang dapat mendukung cita-cita dan keinginan terbesarnya pada waktu itu. Yaitu membangun gerakan yang di dasarkan atas nilai-nilai keislaman. Berbanding terbalik dengan hijrah politik yang melanda kaum elit saat ini. Gerakan- gerakan yang dibangun bukan di dasarkan pemahaman agama, namun pada kepentingan dan kebutuhan yang utama.

Moral serta Etika Politisi

Pola hubungan tradisi hijrah politik pada pemahaman etika moral politik para elit tentu menunjukkan citra yang berbeda. Secara aturan kelembagaan negara kita yang menganut trias

politika, elit politik yang berada di dalam parlemen memiliki tiga fungsi strategis, sebagai pembuat kebijakan yang mengharuskan elit untuk dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sebagai seorang penyusun kebijakan, peraturan yang baik lahir dari pemikiran serta disusunnya legal drafting yang baik pula. Mekanisme ini yang harus dipenuhi elit parlemen untuk dapat menyuarakan kepentingan rakyat. Dan yang utama elit parlemen harus mampu menjadi narahubung antara negara dan rakyat. Jangan sampai informasi dan kebutuhan rakyat menjadi tumpang tindih. Perilaku elit masa kini menunjukkan penurunan etika dan moral, terlebih ucapan-ucapan yang dimunculkan pada saat di media kurang menunjukkan siapa elit tersebut. Karena etika politik yang dibangun bahwa setiap anggota partai politik yang berhadapan langsung dengan media dan

mewakili partai harus tunduk dan patuh pada aturan yang disepakati.

Ini ditunjukkan pada debat kampanye yang ada di salah satu televisi tentang siapa yang membela pemerintah dan siapa yang membela oposisi. Kasus yang ramai terjadi di media menyangkut persoalan kubu pemerintah dan oposisi ditunjukkan dalam skema saling tuding menuding dan saling lapor melapor. (MediaIndonesia, 2019) Perilaku ini menunjukkan bahwa kebenaran yang ada dalam politik menjadi bias. Dimana perspektif hukum menjadi jawaban atas rasionalitas politik yang dimunculkan kedua kubu. Model kampanye elit yang membuat informasi palsu membuat masyarakat semakin menurunkan kepercayaannya.

Ketokohan elit yang populis telah membuat banyaknya elit yang berhijrah politik. Banyak partai politik yang berebut hati masyarakat dengan branding para *publik figure* dan elit populis. Semuanya

berlomba untuk mendapatkan simpati rakyat. Dalam perdebatan teoritis, populisme dipandang sebagai konsep yang mengalami ambiguitas, elusif dan tumpang tindih. Kompleksitas populisme disebabkan karena kurangnya konseptualisasi ide dan cenderung lebih banyak memahami dari lensa perbandingan atas banyaknya kasus-kasus global. Semua itu dipandang dalam berbagai sudut pandang dan kepentingan. (Patten, 2001)

Publik figur yang populis dalam keikutsertaannya pada kontestasi politik, sebenarnya juga berhitung. Mayoritas masyarakat yang mengetahui popularitasnya kadangkala bukan berada di daerah yang menjadi dapil dimana dirinya akan mencalonkan diri. Pendekatan diskursif Ernesto Laclau yang menekankan pada konstruksi politik. Membentuk adanya penyatuan “tuntutan/aspirasi” yang sama dari masyarakat yang berlatar belakang berbeda. Pandangan ini menunjukkan bahwa elit

politik harus responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dimana kesamaan simbolik antar rakyat melalui proses politik harus sejalan dengan agenda politik. (Benvenuto et al., 2012)

Perbedaan tuntutan serta perilaku politik dalam proses pertukaran sosial di masyarakat menyebabkan adanya distorsi informasi publik. Fakta sosial yang ada menjelaskan bahwa perilaku elit memiliki perbedaan kepentingan yang beragam dengan tuntutan rakyat. Pilihan politik elit tidak dapat disatukan, dipaksa dan diharuskan seragam. Posisi inilah yang sering membuat elit merasa tidak mendapatkan simpati pemilihnya. Ketika pemilih mengikuti logika yang penuh dengan informasi elit dan kemudahan mengakses platform media digital. Kesadaran politik akan terbentuk begitu saja. Media informasi menyederhanakan program demokratisasi sehingga persepsi aksesibilitas yang bebas di wujudkan dalam bentuk pertarungan konten politik

di media. Fenomena ini bukan hanya tentang pertarungan konten politik, tetapi juga bagaimana membentuk pandangan masyarakat yang bentuknya hanya sebagai wacana.

Konten politik yang digunakan sebagai bahan media kampanye membuat kebangkitan pragmatism politik mulai mendominasi dan menjadi strategi utama para elit. Perilaku yang terjadi menunjukkan bahwa rasionalitas elit dalam menggunakan konten politik yang pragmatis lebih cenderung menuju arah *post-democracy*. Kondisi ini selain digambarkan dalam perilaku elit, juga dalam konten politik yang dibingkai sebagai wujud kepentingan rakyat. Padahal tujuan utamanya untuk melanggengkan kekuasaan politiknya. Keterkaitan elit populer dengan konten media yang pragmatis dapat menjadi landasan mengetahui tradisi elit yang berpindah. Dimana kebangkitan populisme terhadap dinamika politik

electoral serta tindakan elit menjelang pemilu dapat mendongkrak popularitas suara elit di dapilnya.

Pada masa sekarang ini politik dilihat sebagai produk mendapatkan kekuasaan demi terwujudnya keinginan beberapa pihak. Saat ini partai politik menggunakan keilmuannya hanya untuk menciptakan pola kekuasaan yang tersegmen pada legitimasi rakyat. Ideologi yang ditawarkan hanya pada saat hajatan rakyat begitu dilematis ketika media menggambarkan tentang betapa hancurnya moral dan etika para elit politik. Penguatan citra populis dalam persaingan popularitas yang dianggap sebagai motif utamanya.

Tentang elit berpindah partai untuk kepentingan rakyat, namun kepentingan partailah yang menjadi tujuan utama. Memanipulasi pikiran masyarakat untuk memenuhi kemauannya serta partai yang menjadi platform. Populisme gaya Jokowi contohnya, *blusukan* yang awal mulanya hanya

sebagai gaya politik membentuk legitimasi masyarakat dalam upaya menegaskan kekuasaan elit. Pemimpin populis tersebut yang seperti inilah di rasa masyarakat dekat pemimpin. Berkaitan dengan kondisi ini, masyarakat sebenarnya dilema apakah model gaya politik yang sederhana dapat meningkatkan popularitas.

Identitas sebagai instrument politik utama nyatanya lebih berpengaruh. Meskipun sebagai langkah pragmatis dalam menegaskan kekuasaan. Strategi politik ini mampu membentuk *frame* masyarakat akan kebutuhan elit. Inilah yang memaksa para elit-elit politik pragmatis mengikuti gaya politik yang semacam itu. Melakukan tindakan yang sederhana dengan *frame* menyentuh sehingga menimbulkan perasaan simpati masyarakat.

Titik balik elit pragmatis di Indonesia pada akhirnya ditandai dengan kurangnya penguatan identitas yang menyebabkan polarisasi kekuasaan

tidak menyeluruh. Melihat tradisi elit dalam asumsi *elite adjustment*, (Permana, 2017) memberikan pemahaman bahwa strategi politik yang harus dilakukan oleh para elit disesuaikan dengan tren pemilih yang ada di Indonesia. Dimana aspek religious menjadi salah satu dasar dipilihnya seorang elit.

Sebagaimana ini terjadi dalam taktik Prabowo dengan narasi politik identitas yang menempatkan Jokowi dan partai pendukungnya ke dalam skema antagonis yang begitu dibenci oleh masyarakat Islam. Seperti yang di munculkan di beberapa laman berita nasional Tempo (Selasa, 12 Maret 2019 14:30 WIB) seorang politisi senior, Amien Rais Sebut Malaikat Doakan Jokowi Kalah di Pilpres 2019. *“Tiap malam (malaikat) lapor kepada Allah, ‘Ya Allah, Indonesia itu punya potensi bagus, tapi pimpinannya ugal-ugalan. Tolong ya Allah, kalahkan, tentukan kalah’,”*. (IslamiCo, 2019) Strategi politik semacam inilah yang membuat

kegaduhan. Mencoba memobilisasi politik identitas dengan rasionalitas elit yang bersifat *hoaks*. Inilah narasi politik yang bernuansa pragmatis di era pasca kebenaran.

BAB PENUTUP

SEKELUMIT CERITA SINGKAT

Mendatangi situs merupakan perilaku yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal mistis. Di Indonesia, perilaku mendatangi situs merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Mulai dari rakyat kecil sampai pejabat, pengusaha sampai politisi juga seringkali melakukan hal tersebut. Dengan tujuan untuk mencari jodoh, menang pemilu/ pilkada, naik jabatan, bahkan sampai hal-hal yang berbau negatif seperti santet. Tidak terkecuali dalam konteks politik, banyak politisi yang mendatangi paranormal, situs, punden untuk meminta pertolongan secara mistis.

Perilaku yang dilakukan para politisi tidak ubahnya sebuah tradisi yang di jadikan sebagai budaya wajib menjelang pemilihan. Sikap yang menunjukkan adanya ketamakan pada jabatan membuat banyak politisi menghalalkan segala cara, untuk bisa merebut

atau mempertahankan jabatan. Karena umumnya mesin partai tidak berjalan dan para calon tidak betul-betul memahami aspirasi konstituennya sendiri, mereka pun “terjebak” untuk menggunakan cara-cara lain.

Proses ritualisasi politik tidak ubahnya sebuah tata cara seorang elit yang menginginkan kekuasaan secara budaya politik. Spiritualitas hingga religiusitas politisi dengan perilaku mendatangi situs-situs tersebut dalam melakukan banyak praktek ritual merupakan kepercayaannya. Praktek ritual yang dilakukan oleh para elit dalam upaya mencari dukungan memang tidak sepenuhnya berhasil, namun dengan adanya kepercayaan yang kuat dari para elit politik menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara ritual ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar, H. (n.d.). *Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim*: JURNAL ILMU SOSIAL INDONESIA, VOL.2,NO.1,Maret 2015 hal 85-102.
- Agus, Bustanuddin. (2006). *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, Taufik (ed.). (1983). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono Herusatoto. 2005. *Symbolisme Dalam Budaya Jawa*. Jogjakarta: Hanindita Graha Widia
- Clarke, David L. 1978. *Analytical Archaeology*. Second Edition. New York : Columbia University Press.
- Creswell. John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chalik, A. (2015). *ELITE LOKAL BERBASIS PESANTREN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR*. KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 3, 1987/1988, hal. 989; lihat Juga Azyumardi Azra, "Ulama, Politik dan Modernisasi", *Ulumul Qur'an*, II, No.7 (1990)
- Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Lembaga Kepercayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Ppt.* (Disampaikan pada kegiatan

Fasilitasi Forum Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Ketuhanan YME di Hotel Majapahit, Surabaya, 6-8 Maret 2013). Dokumen Padepokan Suroloyo.

- Darori, H.M, dkk. 2002. *Islam dan kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama media.
- Damami, Muhammad. *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta, LESFI, 2002.
- Foley, William A. 1977. *Anthropological Linguistics: An Introduction*. New York:Blackwell
- Geertz, Clifford. 1992. *The Interpretation Of Cultures: Selected Essays*. (penerj.) Francisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Geerts, Clifford. (1981). "Agama di Jawa: Pertentangan dan Perpaduan", dalam Roland Robertson (ed.). *Sosiologi Agama*. Tanpa Tempat Terbit: Aksara Persada.
- Geertz, Cliffort. 1964. *The Religion of Java*. London: The Free Press of Glancoe.
- Gaventa, John, "Finding The Spaces for Changes; A Power Analysis", *IDS (Institute of Development Studies) Bulletin*, Vol. 37, No. 6 (November 2006)
- Graaf, H.J. de "Southeast Asian Islam in the Eighteenth Century", dalam P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, dan Bernard Lewes (eds.) *The Cambridge History of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1970)

- Herbert Blumer dan George Herbert Mead dalam Agus Salim (2008). *pengantar sosiologi mikro*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Haboddin, M. (2020). Sirkulasi Elite Lokal di Bantaeng. *Jurnal Transformative*, 6(1), 72–90.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.4>
- Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). *HEGEMONI RELIGIO-KEKUASAAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL*. Sosial Budaya, Volume 16, Nomor 01, Juni 2019, pp. 9 - 24
- Halim, Abdul, *Politik Lokal; Pola, Aktor dan Dramatikalnya* (Yogyakarta: LP2B, 2014)
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/12/28/p1moo7257-ustaz-abdul-somad-dicekal-pbnu-pemerintah-harus-jelaskan>
[https://www.malang-post.com/berita/detail/pkb-kocar-kacir/20 februari 2020](https://www.malang-post.com/berita/detail/pkb-kocar-kacir/20%20februari%202020)
http://www.powercube.net/wpcontent/uploads/2009/12/finding_spaces_for_change
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-mendirikan-negara-khilafah-di-nkri?page=all>
- <https://www.malangtimes.com/baca/54314/20200625/214400/pakar-politik-ub-malang-kunci-pilkada-kabupaten-malang-ada-di-nu>
- Jannah, H. (2015). *KYAI, PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA POLITIK KEKUASAAN*. **FIKRAH:**

**Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan
Volume 3, No.1, Juni 2015**

- Jati Kusumo. *Merajuk Kembali NKRI*. 2014 (artikel)
- Jamil, H. Abdul, Mas'ud Abdurrahman, Amin Syukur, H. M, Anasom, Achmadi Asmoro, Amin,.
- Ki Kresna Soesanto. *Penguatan Pemuda Penghayat Kota Malan*. 2015 (Artikel)
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Pesta Demokrasi di Pedesaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992)
- Mulyana, Deddy, Jalaludin Rahmat, *Komunikasi Antar Budaya* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1989), hal 19
- Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, Rahmat Jalaluddin, *Komunikasi Antarbudaya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Mulder, Niels. 1983. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa, Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*. Jakarta: Gramedia.
- Mulder, Niels. 1983. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa: Penjelajahan mengenai Hubungannya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Mahadi, U. (2015). KOMUNIKASI POLITIK KIAI PADA KAMPANYE PEMILU. *ADDIN*, 9(2), 229. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.614>
- Natsir,M, *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

- Nurhadi, Sunarso, PERAN KIAI DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI PEMILIH, *JIPPK, Volume 3, Nomor 2, Halaman 169-175* ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Nuryansah, M. (2014). TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman, Vol 3 No 1 (2014): Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 233–242.*
- Pradana, M. Y. A. (2019). RELASI SOSIAL ELIT POLITIK DAN SESEPUH DESA MELALUI LANGGAR DI KABUPATEN MALANG. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* Volume. 13, Nomor. 1 Januari-Juni 2019 | ISSN: 1978-4457 (cetak) ISSN: 2548-477X (online) | doi: <http://dx.doi.org/10.14421/> | JSA.2019.
- Pradana, M. Y. A. (2020). Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians. *Journal of Politics and Policy* Volume 2, Number 2, Juni 2020.
- Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2008). *Teori Sosiologi, Dari Teori sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern.* Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Ritzer, G. dan Goodman, D.J., 2004. *Sociological Theory.* Edisi ke-6. New York: McGraw-Hill
- Rush, M. & Althof, P. 2007. *Pengantar sosiologi politik.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Rosyid, Harun Nur, dkk,. 2004. *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat* (Jakarta: Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,
- Salehudin, A. (2016). KONSTRUKSI JARINGAN SOSIAL PESANTREN: STRATEGI EKSIS DI TENGAH PERUBAHAN. *RELIGI JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA*, 10(2), 204.
<https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1002-05>
- Saputro, A. (2018). AGAMA DAN NEGARA: POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019. *ASKETIK*, 2(2). <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>
- SP. Varma, *Teori Politik Modern*, terj. Yohannes Kristiarto, dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Stake, Robert E, 2005. *The Art of Case Study*, London: Sage Publication, Inc
- Sudiana, I Nyoman. Skripsi: *Esensi Lingga Yoni di Pura Batur Ning Desa Pakraman Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar*. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Pdf.
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Simuh, 1988, *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita*, Jakarta: UI Press
- Simuh, 2003, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Bandung: Mizan
- Simuh, 1986, *Nilai Mistik dalam Kebudayaan dan Kepustakaan Jawa*, Yogyakarta: Balai Penelitian

Bahasa, 1986.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Afabeta: Bandung.

Soehadha, Moh. (2003). *Tesis: Umat Agama dalam Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah mada.

_____. (2008). *Orang Jawa Memaknai Agama*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Turner, Bryan S. (2012). *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Veeger, K. J. 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

West, Richard & Lynn H, Turner. (2007) *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba.

Winangun, Darpan A dkk. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ke Tiga)*. Jakarta. Balai Pustaka

Yafie, Ali “Analisa Perjuangan Ulama di Indonesia”, Panji Masyarakat, No. 69 (April 1989)lihat Juga Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

Zawawi, A., Pd, S., & Pd, M. (2015). *POLITIK DALAM PANDANGAN ISLAM*. *Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015* hal.85-100

Terimakasih kepada Para Tokoh Masyarakat, Politisi, Praktisi Spiritual hingga Para Pelaku Ritual Politik tanpa Terkecuali yang Telah di Wawancarai Penulis

Mahatva Yoga Adi Pradana..... 159

BIOGRAFI PENULIS

MAHATVA YOGA ADI PRADANA Lahir di Kota Malang 10 Desember 1990. Memiliki ketertarikan dalam bidang sosial dan politik. Karirnya dimulai saat mahasiswa menjadi aktivis hingga akademisi. Kemudian dilanjutkan dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat lokal. Terdapat tiga penghargaan berhasil di dapatkan dari Tingkat Nasional, Provinsi hingga Kota/Kabupaten. Memiliki seorang istri bernama Mega Karunia Gumelar dan setelah menikah Saat ini dirinya menjadi Dosen di Prodi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tetap berkontribusi pada dunia Politik yang membesarkannya. Berikut adalah beberapa penelitian dan survey yang pernah dilakukan.

1. Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Malang 2012. Ketua Peneliti
2. Peran LSM Malang Berwarna Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan PAUD. Ketua Peneliti, 2013
3. Penelitian *City Branding* Kabupaten Malang. Anggota ,2015
4. Penelitian survey Elektabilitas Pasangan Calon Walikota Batu 2012, Oleh LSM . Ketua Tim
5. Survey Popularitas Bacawali Dalam Pilwali Kota Malang 2013. Survey dilakukan 3 kali pada 1 – 20 Maret 2013, 20 – 29 Juli 2012, 1 – 27 Agustus 2012. Ketua Tim
6. Survey Elektabilitas Pasangan Calon Walikota Malang 2013. Ketua Tim.
7. Quick Count Pilwali Kota Malang, 23 Maret 2013. Anggota Tim.
8. Quick Count Pilwali Kota Batu, 2 Oktober 2012. Anggota Tim

9. Penguatan Kapasitas Lokal Untuk Perencanaan Pembangunan Desa dalam Mendukung Implementasi UU Desa No 06 Tahun 2014, Anggota.
10. Peran Civil Society Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup. Ketua Tim 2014.
11. Penelitian Kualitas SDM Desa Sitarjo dalam Upaya Konservasi Penyu Watuleter. 2015. Ketua Tim
12. Penelitian Kualitas SDM Desa Gubuk Klakah Melalui Agro Sapi Perah Nusa Pelangi. 2015. Ketua Tim
13. Praktek Elit Politik Mencari Dukungan Melalui Ritual Politik (Studi di Situs Kerajaan Singhasari) 2016. Peneliti
14. Penelitian Peran Serta Pelaku Wisata dalam Branding Wisata Kabupaten Malang, 2016. Ketua peneliti
15. Survey Elektabilitas Pasangan Calon Bupati Kabupaten Malang, 2016. Ketua Tim
16. Survey Elektabilitas dan Kepuasan Publik Calon Walikota Batu 2017, Ketua Tim
17. Survey City Branding Kabupaten Malang,” The Heart Of East Java “, 2017. Ketua Tim
18. Survey Elektabilitas dan Popularitas Gubernur Jawa Timur Wilayah Malang Raya, 2018. Ketua Tim
19. Survey Elektabilitas dan Popularitas Walikota Malang 2018. Ketua Tim
20. Survey Partisipasi Politik serta Elektabilitas Presiden dan Wakil Presiden di Malang Raya 2019
21. Penelitian Dasar Interdisipliner Covid-19 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020, Ketua Peneliti

" Buku ini menjadi bukti bahwa tradisi yang dilakukan oleh para politisi menjelang pemilihan menjadi sebuah ritual dan wujud spiritualitas mereka dalam rangka mempertahankan serta memperoleh kekuasaan yang kadang dianggap tidak rasional namun banyak dilakukan itulah Ritual Politik "

Mahatva Yoga Adi Pradana
Penulis



ISBN 978-623-7816-15-7

